



BADAN KEAHLIAN DPR RI

**BRIDGING THE RESEARCH TO THE ROLE AND FUNCTIONS OF PARLIAMENT
"EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING"**

**INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
TIM SENERGI BADAN KEAHLIAN
SETJEN DPR RI**

**KEGIATAN
20 MEI – 03 JUNI 2021**



2/6/21

**INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN DIKELOLA OLEH:
TIM SENERGI ANTARA BADAN KEAHLIAN, PARA KABAG SET AKD DEPUTI PERSIDANGAN, DAN TENAGA AHLI AKD**

DAFTAR ISI

KOMISI I	1
A. FUNGSI LEGISLASI	1
B. FUNGSI PENGAWASAN	1
C. FUNGSI ANGGARAN	4
KOMISI II	4
A. FUNGSI LEGISLASI	4
B. FUNGSI PENGAWASAN	5
C. FUNGSI ANGGARAN	5
KOMISI III	9
A. FUNGSI LEGISLASI	9
B. FUNGSI PENGAWASAN	9
C. FUNGSI ANGGARAN	12
KOMISI IV	12
A. FUNGSI LEGISLASI	12
B. FUNGSI PENGAWASAN	12
C. FUNGSI ANGGARAN	17

KOMISI V	28
A. FUNGSI LEGISLASI	28
B. FUNGSI PENGAWASAN	29
C. FUNGSI ANGGARAN	30
KOMISI VI	33
A. FUNGSI LEGISLASI	33
B. FUNGSI PENGAWASAN	34
C. FUNGSI ANGGARAN	35
KOMISI VII	36
A. FUNGSI LEGISLASI	36
B. FUNGSI PENGAWASAN	36
C. FUNGSI ANGGARAN	38
KOMISI VIII	39
A. FUNGSI LEGISLASI	39
B. FUNGSI PENGAWASAN	39
C. FUNGSI ANGGARAN	39
KOMISI IX	40
A. FUNGSI LEGISLASI	40

B. FUNGSI PENGAWASAN	40
C. FUNGSI ANGGARAN	42
KOMISI X	43
A. FUNGSI LEGISLASI	43
B. FUNGSI PENGAWASAN	43
C. FUNGSI ANGGARAN	45
KOMISI XI	46
A. FUNGSI LEGISLASI	46
B. FUNGSI PENGAWASAN	46
C. FUNGSI ANGGARAN	48
BADAN LEGISLASI	57
BADAN URUSAN RUMAH TANGGA	60
BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA	60
BADAN ANGGARAN	62
BADAN KERJASAMA ANTAR PARLEMEN	65
MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN	80

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
TIM SENERGI BADAN KEAHLIAN
SETJEN DPR RI

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
1.	KOMISI I	A. FUNGSI LEGISLASI - B. FUNGSI PENGAWASAN 1. Pada hari Senin, 24 Mei 2021, Ketua Komisi I DPR RI menerima <i>Courtesy Call</i> Delegasi Parlemen Rumania yang dipimpin oleh Nicu Falcoi. <i>Courtesy call</i> membahas upaya peningkatan hubungan bilateral kedua negara Indonesia-Rumania yang telah terjalin selama lebih dari tujuh dekade, utamanya kerja sama di bidang pertahanan, perdagangan, dan investasi. Pada bidang pertahanan, sebagai bentuk upaya indonesia mendiversifikasi sumber alutsistanya, Rumania dapat menjadi pilihan alternatif bagi Indonesia dalam memenuhi kebutuhan alutsistanya. Sebagai anggota Uni Eropa dan NATO, Rumania menjadi salah satu tempat produksi dan perawatan alutsista bagi UE dan NATO. Peningkatan kerja sama bilateral di bidang politik dan ekonomi adalah momentum hubungan bilateral Indonesia-Rumania yang telah berlangsung lebih dari tujuh dekade.

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		Dalam <i>courtesy call</i>, Komisi I menyampaikan pada delegasi Rumania untuk membantu Indonesia dalam memerangi kampanye negatif produk sawit Indonesia di Uni Eropa. Sawit Indonesia adalah produk yang telah mempertimbangkan keberlanjutan dalam proses produksinya. Selain itu, saya juga berharap Rumania—sebagai anggota Uni Eropa—dapat berperan dalam percepatan perundingan I-EU CEPA. 2. Komisi I pada tanggal 2 Juni 2021, menerima <i>Courtesy Call</i> delegasi Uni Eropa yang dipimpin YM Josep Borrell, Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan. <i>Courtesy Call</i> membahas hubungan Indonesia–Uni Eropa yang telah terjalin selama lebih dari tiga puluh tahun, utamanya kerja sama dalam bidang ekonomi. Komisi I menyambut baik prinsip-prinsip Kebijakan Uni Eropa yakni: <i>security</i>, <i>prosperity</i>, dan <i>sustainability</i>. Ia juga menyampaikan apresiasi atas bantuan Uni Eropa ke negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia untuk mengatasi pandemi Covid-19. Tidak hanya itu, Komisi I juga menyampaikan penghargaan kepada UE karena mengambil peran sebagai kontributor utama untuk COVAX dan berkontribusi lebih dari €2,2 miliar untuk inisiatif global yang memimpin upaya untuk mengamankan akses yang adil dan merata ke vaksin COVID-19 yang aman dan efektif bagi negara-negara berpendapatan rendah dan menengah. Kedua belah pihak menyepakati bahwa perundingan IE-CEPA harus dituntaskan demi meningkatkan peluang kerja sama ekonomi dan perdagangan. IE-CEPA ini adalah kerangka kerja sama yang diharapkan dapat menjadi tolok ukur bagi peningkatan kerja sama bilateral

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		kedua belah pihak. Berkaitan dengan produk sawit, Josep Borell membantah anggapan bahwa Uni Eropa melarang produk sawit Indonesia. Perlu ada dialog komprehensif yang melibatkan bukti ilmiah bahwa kepentingan ekonomi Indonesia sejalan dengan prinsip ramah lingkungan yang dianut Uni Eropa. 3. Melakukan Kunker Spesifik dalam rangka melihat: 1) Kesiapan Kodam Iskandar Muda dalam melaksanakan tugas pokok TNI pada Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). 26 Mei 2021 – 28 Mei 2021 2) Kesiapan Kodam Bukit Barisan, Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan tugas pokok TNI pada Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). 28 Mei 2021 – 30 Mei 2021 4. Rapat Kerja dengan Menteri Pertahanan dan Panglima TNI 31 Mei 2021 dengan pembahasan mengenai: 1) Strategi dan kebijakan pertahanan negara tahun 2020-2024 2) Perkembangan MEF Tahap III 2020-2024 3) Perkembangan situasi dan kondisi keamanan di Papua dan Papua Barat 4) Peran dan fungsi intelijen militer dalam mengamankan wilayah perbatasan, dan; 5) Isu-isu mengenai pelaksanaan UU Nomor 32 Tahun 2019 tentang PSDN untuk Pertahanan Negara

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		C. FUNGSI ANGGARAN 1. Komisi I DPR RI meminta Kementerian Luar Negeri untuk memprioritaskan alokasi anggaran Tahun Anggaran 2022 untuk: a. Penguatan diplomasi dan kerja sama internasional Indonesia guna meningkatkan peran dan kepemimpinan Indonesia di dunia internasional. b. Penguatan kelembagaan dan pembangunan pusat data terintegrasi guna pelayanan publik dan perlindungan WNI di luar negeri, terutama PMI dan ABK. c. Diplomasi vaksin guna pengamanan pasokan vaksin dari negara produsen utama untuk pemenuhan kebutuhan di dalam negeri. d. Peningkatan kerja sama dan koordinasi terintegrasi Kemlu dengan kementerian/ lembaga terkait untuk membangun langkah strategis dalam pemulihan ekonomi dalam negeri. 2. Raker dengan Kemhan 02 Juni 2021 dengan isu-isu pembahasan: a. Pembahasan RKP dan RKA Kemhan TA 2022 b. Rencana Induk Pertahanan Negara Tahun 2020-2044
2.	KOMISI II	A. FUNGSI LEGISLASI -

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		B. FUNGSI PENGAWASAN 1. Komisi II melakukan rapat kerja/rapat dengar pendapat dengan Menteri PAN&RB dan Kepala BKNB terkait hasil pelaksanaan tes wawasan kebangsaan Pegawai KPK. 2. Komisi II melakukan rapat dengar pendapat dengan Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Dirjen Otda Kemendagri, Dirjen Polpum Kemendagri, dan Ketua DKPP terkait konsep dan desain penyelenggara Pemilu Serentak Tahun 2024 dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024. 3. Komisi II melakukan rapat dengar pendapat dengan Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Dirjen Otda Kemendagri, Dirjen Polpum Kemendagri, dan Ketua DKPP terkait penyusunan anggaran dan pembahasan draft tahapan pemilu dan pemilihan serentak Tahun 2024. C. FUNGSI ANGGARAN 1. Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat dengan Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Kepala Staf Kepresidenan, dan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila terkait Evaluasi pelaksanaan anggaran Tahun 2021 dan Pembicaraan Pendahuluan Pembahasan RAPBN TA 2022 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022. Komisi II akan membahas secara mendalam dalam Rapat pembahasan RAPBN Tahun 2022 terkait dengan Pagu Indikatif RAPBN Tahun 2022 yang diajukan oleh Kementerian sekretariat Negara sebesar Rp1.872.456.361.000,- (satu trilyun delapan ratus tujuh puluh dua milyar empat ratus

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		lima puluh enam juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah); Kantor Staf Presiden (KSP) sebesar Rp103.959.859.000,- (seratus tiga milyar sembilan ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah); Sekretariat Kabinet sebesar Rp326.315.931.000,- (tiga ratus dua puluh enam milyar tiga ratus lima belas juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah); dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebesar Rp193.877.246.000,- (seratus sembilan puluh tiga milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah). 2. Komisi II juga terhadap usulan penyesuaian anggaran/pergeseran alokasi anggaran per program Kementerian Sekretariat Negara, dibahas secara mendalam pada Raker/RDP RAPBN Tahun 2022 yang akan datang. 3. Komisi II terhadap usulan tambahan anggaran Sekretariat Kabinet sebesar Rp21.644.105.000,- (dua puluh satu milyar enam ratus empat puluh empat juta seratus lima riibu rupiah), akan dibahas secara mendalam pada Raker/RDP RAPBN Tahun 2022 yang akan datang. 4. Komisi II terhadap usulan tambahan anggaran yang diajukan oleh BPIP sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah), Komisi II DPR RI akan membahasnya secara mendalam pada Raker/RDP RAPBN Tahun 2022 yang akan datang. 5. Komisi II terhadap realisasi anggaran tahun 2021 sampai dengan bulan Mei 2021 yakni Kementerian Sekretariat Negara sebesar 26,37%; Sekretariat Kabinet seberar 31,66%; dan

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		BPPI sebesar 27,79%, meminta agar segera diberikan pagu alokasi anggaran tahun 2021 dan rinciannya sesuai dengan jenis belanja dan kegiatan (satuan tiga) sebagai bahan pendukung rapat pembahasan RAPBN tahun 2022 yang akan datang. 6. Rapat Dengar Pendapat dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum RI dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI terkait Evaluasi pelaksanaan anggaran Tahun 2021 dan Pembicaraan Pendahuluan Pembahasan RAPBN TA 2022 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022. 7. Komisi II DPR RI telah mendengarkan penyampaian Pagu Indikatif RAPBN Tahun 2022 Komisi Pemilihan Umum RI sebesar Rp2.452.965.805.000,- (dua trilyun empat ratus lima puluh dua milyar sembilan ratus enam puluh lima juta delapan ratus lima ribu rupiah), dan akan membahasnya secara mendalam pada Rapat pembahasan RAPBN Tahun 2022 selanjutnya. 8. Komisi II DPR RI telah mendengarkan penyampaian Pagu Indikatif RAPBN Tahun 2022 Badan Pengawas Pemilihan Umum RI sebesar Rp1.982.860.804.000,- (satu trilyun sembilan ratus delapan puluh dua milyar delapan ratus enam puluh juta delapan ratus empat ribu rupiah), dan akan membahasnya secara mendalam pada Rapat pembahasan RAPBN Tahun 2022 selanjutnya. 9. Terhadap usulan tambahan rencana anggaran Tahun 2022 yang disampaikan Komisi Pemilihan Umum RI sebesar Rp10.842.876.876.000,- (sepuluh trilyun delapan ratus

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		empat puluh dua milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), Komisi II DPR RI meminta kepada KPU RI untuk segera menyampaikan rincian usulan tambahan anggaran tersebut untuk selanjutnya dibahas secara mendalam pada Rapat RAPBN Tahun 2022 yang akan datang. 10. Terhadap usulan tambahan anggaran yang disampaikan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI sebesar Rp137.614.099.000,- (seratus tiga puluh tujuh milyar enam ratus empat belas juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri dari kekurangan anggaran Belanja Operasional Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp118.636.043.000,- (seratus delapan belas milyar enam ratus tiga puluh enam juta empat puluh tiga ribu rupiah) dan kekurangan anggaran Belanja Operasional Tahun 2022 sebesar Rp18.978.056.000,- (delapan belas milyar Sembilan ratus tujuh puluh delapan juta lima puluh enam ribu rupiah), serta tambahan anggaran kegiatan non tahapan sebesar Rp978.937.909.000,- (sembilan ratus tujuh puluh delapan milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah), Komisi II DPR RI meminta kepada Bawaslu RI untuk segera menyampaikan rincian usulan tambahan anggaran tersebut untuk selanjutnya dibahas secara mendalam pada Rapat RAPBN Tahun 2022 yang akan datang. 11. Terhadap kebutuhan anggaran terkait Pemilu Serentak Tahun 2024 yang diajukan oleh KPU RI dan Bawaslu RI, Komisi II DPR RI akan membahas secara mendalam pada Rapat pembahasan selanjutnya.

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		12. Komisi II DPR RI terhadap penyampaian hasil realisasi anggaran tahun 2021 sampai dengan bulan Mei 2021 yakni KPU RI sebesar 37,51% dan Bawaslu RI sebesar 31,85%, meminta agar segera menyampaikan pagu alokasi anggaran tahun 2021 dan rinciannya sesuai dengan jenis belanja dan kegiatan (satuan tiga) sebagai bahan pendukung rapat pembahasan RAPBN tahun 2022 yang akan datang.
3.	KOMISI III	A. FUNGSI LEGISLASI 1. Komisi III DPR RI masih menunggu Surat Presiden terkait Menteri yang akan ditugaskan dalam Pembahasan RUU tentang Kejaksaan. 2. Komisi III DPR RI berencana mengadakan rapat dengan Badan Keahlian DPR (BKD) guna mendengarkan Penjelasan Kepala BKD sebagai perumus RUU tentang Penyadapan. B. FUNGSI PENGAWASAN 1. Komisi III DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan BNPT tanggal 27 Mei 2021, dengan kesimpulan/keputusan: 1) Komisi III DPR RI mendukung upaya peningkatan sarana, prasarana dan sumber daya manusia guna meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi BNPT, termasuk meningkatkan fungsi pencegahan, deradikalisasi, penegakan hukum dan kerjasama

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		baik internasional maupun regional dalam rangka pemberantasan tindak pidana terorisme guna menciptakan rasa aman di masyarakat. 2) Komisi III DPR RI meminta Kepala BNPT untuk melakukan langkah-langkah antisipatif bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk menelusuri dan mengungkap rencana aksi terror dan penyebaran paham radikal yang menuju terorisme melalui media sosial. 3) Komisi III DPR RI meminta Kepala BNPT agar melakukan penguatan fungsi intellijen sebagai upaya pencegahan dini terhadap aksi teror dengan melakukan koordinasi yang intensif dengan berbagai pihak termasuk Kementerian/Lembaga sebagai upaya untuk mencegah terjadinya aksi terorisme. 2. Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Kepolisian Republik Indonesia tanggal 31 Mei 2021 ditunda dan diagendakan kembali tanggal 16 Juni 2021. 3. Komisi III DPR RI mengadakan Rapat Kerja dengan Kementerian Hukum dan HAM RI tanggal 9 Juni 2021, dengan kesimpulan/keputusan: 1) Komisi III DPR RI dan Menteri Hukum dan HAM RI bersepakat untuk segera menindaklanjuti penyelesaian RUU KUHP maupun RUU yang telah menjadi Prioritas di Tahun 2021 dalam rangka mewujudkan penataan sistem peradilan pidana yang terpadu.

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		2) Komisi III DPR RI mendesak Menteri Hukum dan HAM RI untuk melakukan pengawasan secara lebih ketat terhadap izin tinggal dan pergerakan orang asing di Indonesia agar membantu Pemerintah dalam mencegah penyebaran COVID-19 dan potensi permasalahan sosial di masyarakat. 3) Komisi III DPR RI mendesak Menteri Hukum dan HAM RI untuk terus meningkatkan upaya dalam mengurangi <i>overcrowding</i> (kelebihan populasi), memberikan pemenuhan hak-hak warga binaan secara terukur, meningkatkan pengawasan ketat terhadap masuknya Narkoba dan barang ilegal lainnya, serta dengan meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pihak terkait. Komisi III DPR RI akan menggelar Rapat Kerja Gabungan dengan Kemenkumham, Polri, BNN, Kejaksaan Agung dan Sekretaris Mahkamah Agung dalam penyelesaian masalah <i>over</i>-kapasitas dan penanganan Tindak Pidana Narkotika 4. Komisi III DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik dalam rangka Pengawasan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam di Provinsi Sumatera Utara, Maluku Utara, dan Kalimantan Timur dengan tujuan untuk mendapatkan data dan informasi terkait penegakan hukum di bidang sumber daya alam, penegakan hukum pada masa pandemi Covid 19 dan isu aktual yang berkembang di masyarakat.

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		C. FUNGSI ANGGARAN 1. Komisi III DPR RI mengadakan rapat komisi dalam rangka mengambil keputusan atas RKA K/L Tahun 2022 Mitra Kerja Komisi III DPR RI, dan memutuskan bahwa : 1) Komisi III DPR RI menyetujui RKA K/L dan RKP K/L Tahun 2022 yang disampaikan oleh mitra kerja Komisi III DPR RI dengan beberapa catatan yang disampaikan oleh fraksi-fraksi, yaitu: a. Perlu menambah anggaran Mahkamah Agung RI; b. Komisi Yudisial RI agar menyusun anggaran lebih proporsional dan rasional; c. Menolak Usulan tambahan anggaran BNN sebesar Rp.1,2 Triliun; d. Menolak usulan tambahan anggaran Kepolisian RI sebesar Rp.28,5 Triliun. 2) Hasil pembahasan RKA K/L dan RKP K/L Tahun 2022 Mitra Kerja Komisi III DPR RI akan disampaikan kepada Badan Anggaran untuk disinkronisasi.
4.	KOMISI IV	A. FUNGSI LEGISLASI - B. FUNGSI PENGAWASAN 1. Komisi IV DPR RI telah melaksanakan RDP dengan Eselon I Kementerian LHK dan Kepala BRGM pada tanggal 27 Mei 2021, adapun kesimpulan yang telah disepakati diantaranya:

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		1) Komisi IV DPR RI terus mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove agar pelaksanaan program kerja pada masing-masing satuan kerja diarahkan untuk mendukung program yang berdampak langsung pada pemberdayaan masyarakat serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan. 2) Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Badan Restorasi Gambut dan Mangrove serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan penyesuaian minimal 15% (lima belas persen) dari Anggaran Belanja Tambahan (ABT) dalam rangka melaksanakan rehabilitasi mangrove serta rehabilitasi hutan dan lahan di luar 9 (sembilan) Provinsi yang menjadi wilayah pengelolaan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, melalui Program Padat Karya sebagai salah satu alternatif dalam mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional pada masa Pandemi COVID-19. 3) Komisi IV DPR RI mendukung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dalam melakukan kajian komprehensif mengenai penyebab dan mitigasi musibah banjir besar di Kalimantan Selatan pada awal tahun 2021, yang diharapkan dapat dijadikan dasar pengambilan kebijakan yang lengkap dan menyeluruh dalam pencegahan dan pengendalian kerusakan lingkungan serta pemulihan lingkungan, bukan hanya untuk Provinsi Kalimantan Selatan, tetapi juga wilayah lain dengan kondisi serupa.

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		4) Komisi IV DPR RI terus mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, agar dapat menjadi satuan kerja pendorong dalam pelaksanaan Zona Integritas dan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) bagi satuan kerja di Eselon I lainnya dalam lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 5) Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menguatkan fungsi dan kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di seluruh Indonesia sebagai ujung tombak pengelolaan hutan lestari berbasis masyarakat di tingkat tapak melalui fasilitasi dan bimbingan kepada masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, sebagai upaya untuk peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. 6) Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove untuk melakukan sosialisasi program-program berbasis masyarakat dengan melibatkan tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda melalui kegiatan bimbingan teknis serta pelatihan secara intensif. 7) Komisi IV DPR RI meminta keseriusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dalam menyelesaikan permasalahan konflik satwa liar dengan manusia, termasuk konflik

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		gajah di Provinsi Aceh dan provinsi lainnya secara komprehensif, agar kejadian serupa tidak terulang kembali di kemudian hari. 2. Komisi IV DPR RI melakukan RDP dengan Dirut Perum Bulog pada tanggal 18 Mei 2021, membahas mengenai Ketersediaan dan Pengadaan Pangan Strategis dan isu-isu Aktual Lainnya. Beberapa poin penting dalam rapat antara lain: 1) Komisi IV DPR RI mendukung rencana Perum BULOG untuk tidak melakukan importasi beras mengingat Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Perum BULOG sudah mendekati angka 1,5 juta ton dan akan mendapatkan tambahan yang berasal dari penyerapan gabah dan beras petani pada saat panen gadu/panen berikutnya. 2) Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah segera melunasi hutang bayar kepada Perum BULOG sebesar Rp1.279.260.045.621,57 (satu triliun dua ratus tujuh puluh sembilan miliar dua ratus enam puluh juta empat puluh lima ribu enam ratus dua puluh satu koma lima puluh tujuh rupiah) mencakup selisih harga penyelesaian disposal stok tahun 2020, Program KPSH (Ketersediaan Pangan dan Stabilisasi Harga), dan CSHP (Cadangan Stabilisasi Harga Pangan) Gula. 3) Komisi IV DPR RI meminta Perum BULOG untuk memperbaiki manajemen stok beras CBP. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI mendorong dilakukan rapat gabungan bersama Komisi VI, Komisi VIII, dan Komisi XI dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN,

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		Kementerian Sosial, dan Kementerian Keuangan untuk membahas pengelolaan cadangan beras termasuk mekanisme disposal stok berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 38/PERMENTAN/KN.130/8/2018 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah. 4) Komisi IV DPR RI mendesak Pemerintah untuk segera membentuk lembaga Pemerintah yang menangani bidang pangan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 126, yang sudah harus dibentuk 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan disahkan. 3. Komisi IV DPR RI melakukan RDP dengan Para Dirut BUMN Pangan pada tanggal 19 Mei 2021 membahas mengenai Penyediaan dan Pengadaan Pangan Strategis sesuai Tupoksinya dan Isu-isu Aktual Lainnya. Beberapa poin penting, antara lain: 1) Komisi IV DPR RI merekomendasikan agar pembentukan <i>Holding</i> BUMN Industri Pangan segera direalisasikan dan meminta agar bekerja sesuai dengan kompetensi inti yang didukung oleh tenaga teknis profesional. Selanjutnya Komisi IV DPR RI mendorong <i>Holding</i> BUMN Industri Pangan c.q. PT Sang Hyang Seri (Persero) dan PT Pertani (Persero) untuk fokus kepada pengembangan benih padi, jagung, dan kedelai. 2) Komisi IV DPR RI meminta <i>Holding</i> BUMN Industri Pangan untuk memanfaatkan dan mengoptimalkan sarana prasarana yang dimiliki untuk peningkatan produksi, kualitas dan mutu, perbaikan sistem bisnis dan lingkungan sekitar sentra bisnis, serta

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		menyediakan ketersediaan pangan kepada masyarakat Indonesia yang berbasis hasil-hasil penelitian yang dapat diterapkan secara masal, antara lain peningkatan kualitas garam rakyat yang memenuhi standar produksi untuk industri maupun rumah tangga. 3) Komisi IV DPR RI meminta <i>Holding</i> BUMN Industri Pangan untuk melakukan integrasi internal tata kelola calon <i>Holding</i> BUMN Industri Pangan, serta meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah dalam menjalin kemitraan dan pendampingan dengan petani, peternak, pembudi daya ikan, nelayan, petambak garam, pengolah dan pemasar hasil perikanan maupun pertanian dalam mendukung upaya pemenuhan pangan nasional dan peningkatan kesejahteraan petani, peternak, pembudi daya ikan, nelayan, petambak garam, pengolah dan pemasar hasil perikanan maupun pertanian secara berkelanjutan. C. FUNGSI ANGGARAN 1. Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap usulan Pagu Indikatif Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022 sebesar Rp7.120.421.454.000,00, pada tanggal 8 Juni 2021 dengan komposisi per-Eselon I sebagai berikut: 1) Sekretariat Jenderal, sebesar Rp481.267.538.000,00; 2) Inspektorat Jenderal, sebesar Rp71.370.448.000,00;

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		3) Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, sebesar Rp303.601.481.000,00; 4) Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, sebesar Rp1.848.524.372.000,00; 5) Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, sebesar Rp1.760.743.135.000,00; 6) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, sebesar Rp385.838.339.000,00; 7) Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, sebesar Rp301.458.362.000,00; 8) Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebesar Rp306.594.709.000,00; 9) Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, sebesar Rp271.528.356.000,00; 10) Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya, sebesar Rp246.335.118.000,00; 11) Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, sebesar Rp232.695.285.000,00; 12) Badan Standardisasi dan Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebesar Rp317.330.368.000,00;

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		13) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, sebesar Rp288.348.268.000,00; dan 14) Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, sebesar Rp304.785.675.000,00. 2. Komisi IV DPR RI mendukung usulan penambahan Pagu Anggaran Badan Restorasi Gambut dan Mangrove TA 2022 untuk kegiatan restorasi gambut serta rehabilitasi mangrove di seluruh Indonesia, termasuk di dalamnya anggaran untuk kegiatan pemeliharaan tanaman untuk menjamin keberhasilan program rehabilitasi hutan dan lahan yang telah dilaksanakan. 3. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove untuk menyusun strategi dalam rangka percepatan target pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, termasuk restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove, dengan terus melakukan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk di dalamnya Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Daerah (baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota), serta Perum Perhutani dan PT Inhutani I - V, dengan terus melibatkan peran serta masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan. 4. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove untuk segera merealisasikan kegiatan, program, dan anggaran tahun 2021. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove untuk melakukan realokasi anggaran menjadi kegiatan yang lebih berdampak signifikan terhadap upaya peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan sebagai dampak Pandemi COVID-19, apabila pada minggu terakhir di bulan Agustus 2021 belum terjadi peningkatan realisasi kegiatan secara signifikan. 5. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove untuk menyerahkan rincian realokasi Anggaran Biaya Tambahan (ABT) Tahun Anggaran 2021 pada Badan Restorasi Gambut dan Mangrove yang akan dipergunakan untuk mendukung program/kegiatan rehabilitasi mangrove serta rehabilitasi hutan dan lahan di seluruh Indonesia. 6. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk lebih memperhatikan dan meningkatkan kesejahteraan para tenaga honorer (baik Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dan diusulkan pengangkatannya menjadi ASN (Aparatur Sipil Negara) melalui jalur prestasi karena telah mengabdikan secara terus menerus mengamankan hutan serta menyelamatkan lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati Indonesia. 7. Komisi IV DPR RI melakukan rangkaian RDP dengan para eselon 1 lingkup Kementerian Pertanian, serta melakukan Raker dengan menteri pertanian guna membahas Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2020 dan 2021; ABT 2021; RKA-K/L dan RKP K/L

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		Tahun 2022; dan isu-isu Aktual pada tanggal 24, 25, dan 31 Mei 2021 serta tanggal 2 Juni dan 9 Juni 2021. Beberapa poin penting diantaranya: 1) Komisi IV DPR RI menyetujui usulan perubahan dan realokasi anggaran Kementerian Pertanian TA 2021 semula sebesar Rp19.970.464.957.000,00 menjadi sebesar Rp19.801.161.386.000,00 dan menyetujui usulan realokasi anggaran Kementerian Pertanian TA 2021 sebesar Rp692.150.000.000,00 2) Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Kementerian Pertanian mengenai usulan Pagu Indikatif Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2022, sebesar Rp14.510.592.752.000,00. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk merancang ulang program, kegiatan, dan anggaran per Eselon I lingkup Kementerian Pertanian tahun 2022, berdasarkan evaluasi tahun berjalan dan diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas produksi pangan, pemenuhan kebutuhan pangan, peningkatan daya saing yang berorientasi ekspor, dan peningkatan kapasitas SDM petani, yang akan dilakukan pendalaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3) Komisi IV DPR RI meminta seluruh Direktorat Jenderal teknis bekerja sama dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dalam produksi dan perbanyak benih unggul yang anggarannya bersumber dari Direktorat Jenderal teknis terkait dan mulai dilaksanakan tahun 2021.

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		4) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk segera melakukan evaluasi terhadap stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang berada di Perum BULOG, agar CBP yang tersimpan di gudang Perum BULOG sesuai dengan standar mutu dan segera dilakukan pelepasan terhadap CBP yang telah melampaui batas waktu simpan maupun yang berpotensi mengalami penurunan mutu, yang berdampak kepada beban manajemen Perum BULOG berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 38/PERMENTAN/KN.130/ 8/2018 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah. 5) Komisi IV DPR RI meminta kepada Pemerintah agar melakukan pengaturan dan pengendalian pemasukan gandum yang digunakan untuk pakan sebagai substitusi jagung dalam kondisi harga jagung dalam negeri tinggi dan mengontrol upaya untuk menghindari bea masuk 5%, bekerja sama dengan BUMN Klaster Pangan. 8. Komisi IV melakukan RDP dengan eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan membahas ABT 2021, RKA-K/L Tahun 2022, dan Isu-isu Aktual Lainnya pada tanggal 31 Mei 2021, yaitu: 1) Komisi IV DPR RI menerima penjelasan mengenai Anggaran Belanja Tambahan (ABT) pada Kementerian Kelautan dan Perikanan TA 2021 sebesar Rp43.337.900.000,00 (empat puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) yang selanjutnya program ABT wajib melibatkan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil guna menyangga perekonomian dimasa pandemi COVID-19, serta

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		pemulihan kawasan mangrove, dan mengantisipasi bencana yang diakibatkan oleh kerusakan mangrove. 2) Komisi IV DPR RI menerima penjelasan dan mendukung Kementerian Kelautan dan Perikanan terhadap usulan Rencana Anggaran Belanja pada tahun 2022 yang semula sebesar Rp6.122.087.397.000,00 (enam triliun seratus dua puluh dua miliar delapan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) ditambah sebesar Rp8.043.438.587.000,00 (delapan triliun empat puluh tiga miliar empat ratus tiga puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), sehingga menjadi sebesar Rp14.165.525.984.000,00 (empat belas triliun seratus enam puluh lima miliar lima ratus dua puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah), dengan mengutamakan masukan serta saran dari Anggota Komisi IV DPR RI pada Rapat Dengar Pendapat bersama Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan hari ini dan melibatkan masyarakat kelautan perikanan yakni nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah dan pemasar hasil perikanan, serta pelaku usaha sektor kelautanperikanan, sehingga diharapkan menumbuhkan ekonomi masyarakat kelautan perikanan Indonesia. 3) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan pendalaman dengan menghitung ulang kembali rancangan program, kegiatan, dan anggaran dalam pagu indikatif Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2022

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		yang mendukung pemulihan ekonomi masyarakat kelautan perikanan, diantaranya adalah: a. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, seperti bantuan peningkatan kesejahteraan nelayan (seperti kapal perikanan 5 GT, alat penangkapan ikan, fasilitasi Sertifikat Hak Atas Tanah Nelayan, diversifikasi usaha nelayan, premi asuransi nelayan, kampung nelayan maju, dan fasilitasi jaminan hari tua nelayan), pengembangan korporasi nelayan, perizinan usaha, Bakti Nelayan dan penerapan e-logbook penangkapan ikan; b. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, seperti pembangunan kawasan tambak udang dan bandeng, pembangunan kampung perikanan budidaya, bantuan sarana prasarana budidaya (benih ikan, indukan ikan konsumsi dan hias), pakan mandiri, pra-sertifikat lahan budidaya, dan pengujian residu untuk ekspor dan kebijakan tata kelola bidang perikanan budidaya; c. Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Hasil Kelautan dan Perikanan, seperti pembangunan sentra kuliner ikan, pengembangan prasarana raiser ikan hias, sentra pengolahan ikan, sarana pascapanen, kampanye Gemarikan, promosi skala internasional, pasar ikan, perlengkapan pedagang ikan, peralatan pemasaran, chest freezer, pembinaan UMKM, gudang beku portable, gudang beku pada kawasan shrimp estate, sistem rantai dingin di sentra produksi perikanan, implementasi Sistem Resi Gudang, pabrik es, dan uji teras dan perekayasa produk kelautan perikanan; d. Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, seperti bantuan kelompok penggerak

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		konservasi, Gerakan Cinta Laut, penanganan sampah di pesisir, rencana zonasi di Kawasan Strategi Nasional/Kawasan Strategi Nasional Tertentu, Pengembangan Usaha Garam Rakyat, sarana prasarana wisata bahari, dermaga apung, dan bantuan ekonomi produktif di pesisir dan pulau-pulau kecil; e. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, seperti peningkatan operasional kapal pengawas, peningkatan operasional pesawat patroli, pembangunan kapal pengawas, peningkatan operasional sistem pemantauan Sumberdaya Kelautan Perikanan, peningkatan operasional t, pembinaan kelompok pengawas masyarakat, peningkatan operasional pengawasan kepatuhan kapal perikanan, peningkatan operasional pengawasan kawasan konservasi, IUU Fishing dan. f. Badan Riset SumberDaya Manusia Kelautan dan Perikanan, seperti pelatihan masyarakat kelautan perikanan, penyuluhan kelompok pelaku utama/usaha kelautan perikanan, pendidikan vokasi, riset pengolahan produk dan bioteknologi kelautan perikanan, model sosial dan ekonomi, stock assesment, dan sarana prasarana politeknik kelautan perikanan; g. Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, seperti peningkatan bakti mutu karantina, layanan sertifikasi karantina, penyelesaian kasus pelanggaran karantina ikan, sarana prasarana pengawasan karantina, penerapan standar sistem manajemen dan pengawasan di wilayah perbatasan; h. Inspektorat

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		Jenderal, seperti pelibatan pengawasan Itjen pada setiap program dan kegiatan di Kementerian Kelautan dan Perikanan. 4) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengoptimalkan anggaran belanja pada tahun 2021 dan anggaran belanja tahun 2022 dengan mengutamakan program kegiatan padat karya serta pembinaan teknis dan penyuluhan kepada nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah dan pemasar hasil perikanan, serta pelaku usaha sektor kelautan perikanan. 5) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan mengutamakan program dan kegiatan yang ditujukan kepada anak-anak nelayan dan pelaku usaha kelautan perikanan untuk mendapatkan pendidikan pada Politeknik Kelautan dan Perikanan dengan dukungan yang proposional sesuai potensi daerah/wilayah pesisir kelautan perikanan Indonesia. 6) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan c.q. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya untuk berkomitmen mengalokasikan anggaran di tahun 2022 serta menyelesaikan penyaluran program dan kegiatan Anggaran Belanja Tambahan Tahun 2020 sebesar Rp114,85 miliar beserta anggaran pendampingan kelompok, berupa bantuan ikan konsumsi, udang, ikan hias, cacing sutera, kepiting, dan budidaya ikan dalam ember, mengingat kondisi pandemi COVID-19 saat

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		ini masyarakat kelautan perikanan sangat membutuhkan untuk memulihkan perekonomian mereka. 7) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menyerahkan rincian kegiatan berdasarkan masukan pada rapat hari ini dan evaluasi rincian kegiatan TA 2020/2021 serta jawaban tertulis selambat-lambatnya 2(dua) hari setelah RDP hari ini, untuk kemudian akan dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat selanjutnya dan diputuskan pada Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan. 9. Komisi IV telah melaksanakan Raker MKP membahas evaluasi pelaksanaan APBN tahun 2020 dan 2021, ABT 2021, RKA-K/L dan RKP K/L tahun 2022 dan isu-isu aktual pada tanggal 7 Juni 2021. Point-point yang disepakati yaitu: 1) Komisi IV DPR RI menerima penjelasan KKP terhadap pagu tahun 2022 sebesar Rp6.122.087.397.000.00, namun mendukung penambahan Rp8.043.438.587.000.00 2) Komisi IV DPR RI meminta KKP mengoptimalkan anggaran belanja pada tahun 2021 serta melakukan pendalaman rencana anggaran belanja tahun 2022; 3) Komisi IV DPR RI meminta KKP untuk memperkuat anggaran armada, sarana prasana dan personil PSDKP dalam menjaga SDI di WPP; 4) Komisi IV DPR RI meminta KKP untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat yang melakukan budidaya khususnya pada budidaya ikan hias yang memiliki nilai ekonomi

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		yang tinggi serta pemasarannya dimana pada saat pandemi covid19 ini membantu perekonomian mereka; 5) Komisi IV DPR RI mendorong KKP untuk menyelesaikan program dan kegiatan ABT tahun 2020, sebesar Rp.114.85 miliar; 6) Komisi IV DPR RI meminta KKP mempercepat target realisasi anggaran 2021; 7) Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. KKP melakukan percepatan penerbitan landasan hukum melalui peraturan perundangan terhadap program LIN; 8) Komisi IV DPR RI meminta KKP melakukan kajian ulang seluruh program dan kegiatan pada tahun 2022, sesuai dengan landasan hukum, arah kebijakan nasional dan memprioritaskan kesejahteraan masyarakat.
5.	KOMISI V	A. FUNGSI LEGISLASI 1. Dalam kurun waktu 24 - 25 Mei 2021, Komisi V DPR RI mengadakan Raker perdana dengan Wakil Pemerintah (Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Desa PDT dan Transmigrasi, Menteri Perhubungan, Menteri ATR/Kepala BPN, yang mewakili Menteri Dalam Negeri, yang mewakili Menteri Keuangan dan yang mewakili Menteri Hukum dan HAM) yang ditugaskan Presiden untuk membahas RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (RUU tentang Jalan), dengan agenda Pengantar Musyawarah dalam rangka pembahasan RUU tentang Jalan, yaitu penjelasan DPR RI atas RUU tentang Jalan, pandangan Presiden atas RUU tentang Jalan, dan penetapan mekanisme

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		dan jadwal pembahasan RUU tentang Jalan, serta membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Kesimpulan pada raker dimaksud adalah sebagai berikut: a) Menyetujui mekanisme dan jadwal pembahasan RUU tentang Jalan. b) Menyetujui DIM yang diusulkan tetap oleh Pemerintah berjumlah 614 DIM, dengan catatan apabila ada hal-hal yang bersifat substansial terkait dengan materi yang sedang dibahas oleh Panja dapat dibahas/disempurnakan kembali oleh Panja. c) Menyetujui untuk DIM-DIM lainnya yang terdapat usulan perubahan berupa: perubahan substansi, penambahan substansi baru, penghapusan, dan yang direposisi berjumlah 290 DIM, diserahkan kepada Panja untuk dibahas secara lebih mendalam dan komprehensif. B. FUNGSI PENGAWASAN 1. Dalam kurun waktu 7 – 10 Juni 2021, Komisi V DPR RI mengadakan RDP dengan Mitra Kerja Komisi V DPR RI, dengan rincian sebagai berikut: a) Pada 7 Juni 2021 dengan SekJend, IrJend, Kepala BPSDM dan Kepala BPIW KemenPUPR, serta Sekjen, Irjen, Kepala BPSDM-P, dan Kepala Balitbang Kementerian Perhubungan

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		b) Pada 8 Juni 2021 dengan Dirjen Perhubungan Darat, Dirjen Perhubungan Udara dan Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Kementerian Perhubungan, serta Dirjen Perhubungan Laut, dan Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. c) Pada 9 Juni 2021, dengan Dirjen Cipta Karya, Dirjen Perumahan dan Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan KemenPUPR, serta Dirjen Bina Marga, Dirjen Bina Konstruksi dan Dirjen Sumber Daya Air KemenPUPR. d) Pada 10 Juni 2021 dengan Sekjen, Irjen Kepala BPSDM Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dan Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi KemenDPDTT, serta Dirjen Pembangunan Desa, dan Perdesaan; Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Dirjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal; dan Dirjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa PDTT. C. FUNGSI ANGGARAN 1. Dalam kurun waktu 2 – 3 Juni 2021, Komisi V DPR RI mengadakan Raker/RDP dengan Mitra Kerja Komisi V DPR RI dengan agenda Pembicaraan Pendahuluan RKA K/L dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2022, di mana Komisi V DPR RI memahami Pagu

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		Indikatif TA 2022 masing-masing K/L Mitra Komisi V sesuai Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. S-361/MK.02/2021 dan B.238/M.PPM/D.8/PP.04.02/04/2021 tanggal 29 April 2021, dengan poin penting sebagai berikut: a) Pagu Indikatif Kementerian PUPR TA 2022 sebesar Rp100.459.610.270.000. b) Pagu Indikatif Kementerian Perhubungan TA 2022 sebesar Rp32.932.533.007.000. c) Pagu Indikatif Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi TA 2022 sebesar Rp3.102.388.046.000. d) Pagu Indikatif Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) TA 2022 sebesar Rp3.108.611.438.000. e) Pagu Indikatif Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) TA 2022 sebesar Rp1.967.176.959.000. f) Komisi V DPR RI bersama dengan Kementerian PUPR akan memperjuangkan kenaikan anggaran untuk membiayai program-program prioritas nasional dan program berbasis masyarakat, sesuai mekanisme pembahasan RUU tentang APBN di DPR RI. g) Komisi V DPR RI sepakat dengan semua Mitra Kerja Komisi V DPR RI untuk menyesuaikan alokasi Pagu Anggaran belanja dalam penyusunan program dan kegiatan pada RKA-K/L RAPBN TA 2022 berdasarkan usulan dan hasil kunjungan kerja Komisi V DPR RI dalam memperjuangkan program pembangunan yang berskala nasional,

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		termasuk program pembangunan yang merupakan aspirasi daerah pemilihan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. h) Komisi V DPR RI meminta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi agar program dan kegiatan pada RKA-K/L RAPBN TA 2022 fokus kepada output prioritas Kementerian sesuai dengan tugas dan fungsinya, serta meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan dana desa. 2. Adapun agenda rapat-rapat dimaksud adalah evaluasi pelaksanaan APBN TA 2021 sampai dengan Bulan Mei 2021 dan membahas alokasi anggaran menurut fungsi, program & prioritas anggaran K/L TA 2022 masing-masing unit Eselon I di Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, dan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dengan poin penting sebagai berikut: 1) Terkait dengan evaluasi pelaksanaan APBN TA 2021, Komisi V DPR RI meminta semua Eselon I dari semua Mitra Komisi V DPR RI untuk meningkatkan penyerapan anggaran sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021. 2) Komisi V DPR RI juga memahami penjelasan masing-masing Eselon I dari semua Mitra Komisi V mengenai rincian program dan alokasi Pagu Anggaran untuk Eselon I dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2022.

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		3) Komisi V DPR RI sepakat masing-masing Eselon I dari semua Mitra Komisi V untuk menyesuaikan rincian program dan menyempurnakan RKA-K/L masing-masing Eselon I dalam Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2022, sesuai dengan saran dan pendapat Komisi V DPR RI yang disampaikan dalam rangkaian proses pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2022. 4) Komisi V DPR RI meminta Ditjen Cipta Karya agar rencana program Padat karya Tahun Anggaran 2022 diusahakan 20% dari Anggaran Pagu Indikatif Ditjen Cipta Karya. 5) Komisi V DPR RI meminta kepada Pemerintah untuk segera menyelesaikan proses ganti rugi di peta area terdampak lumpur Sidoarjo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6.	KOMISI VI	A. FUNGSI LEGISLASI 1. RUU BUMN, Rapat Intern Komisi VI DPR RI, Kamis 3 Juni 2021 Pkl 13.00 s.d. selesai, dalam hal Pengesahan Panja Penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang BUMN (Pengesahan Susunan Anggota Panja). 2. RUU BUMN, Rapat Intern Panja RUU BUMN Komisi VI DPR RI, Kamis 3 Juni 2021 Pkl 17.00 s.d. selesai, dalam hal Pembahasan Jadwal Panja Penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang BUMN (Penyusunan dan penetapan Jadwal Kegiatan Panja pada Masa Sidang V TS 2020-2021).

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		B. FUNGSI PENGAWASAN 1. RDP dengan PT. Pertamina (Persero) Kamis 20 Mei 2021 Pkl 14.00 WIB, dalam hal Pelaksanaan Keuangan Negara Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah, (Pembahasan mengenai restrukturisasi anak perusahaan PT. Pertamina/Persero). 2. RDP dengan PT Biofarma (Persero), PT Kimia Farma Tbk, dan PT Indofarma Tbk, Selasa, 25 Mei 2021 Pkl. 13.00-15.30 WIB dalam hal Pelaksanaan Keuangan Negara dan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah, (Pembahasan mengenai:Tindak lanjut penyelesaian kasus pemalsuan antigen; Progress Pembuatan Vaksin; dan Lain-lain). 3. RDP dengan PT. ASABRI/Persero, Rabu 9 Juni 2021 Pkl. 14.00 WIB – selesai Pelaksanaan Keuangan Negara Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah (Pembahasan mengenai Kinerja Perusahaan). 4. Kunjungan Spesifik Komisi VI DPR RI tgl 10-12 Juni 2021 ke PT PAL (Persero), PT Pelindo II/Persero, PT BRI (Persero), Tbk dan PT BRI Agroniaga, Tbk. Dalam hal Pelaksanaan Keuangan Negara Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah (KUNSPEK KE- I: 1) Provinsi Jawa Timur dalam rangka Kunjungan ke PT PAL/Persero; 2) Provinsi Lampung, dalam rangka Peninjauan Pelabuhan Panjang Lampung (PT Pelindo II /Persero bk.). 5. RDP dengan Dirut PT PLN (Persero), Selasa 25 Mei 2021 Pkl.16.00 WIB – selesai, dalam hal Pelaksanaan Keuangan Negara dan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah (Membahas Evaluasi Kinerja Perusahaan PT. PLN (Persero)).

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		6. Kunker PT.Perusahaan Gas Negara Tbk dan PT. Pertamina (Persero), Kunker Spesifik Panja BUMN Energi tgl 27 s.d. 29 Mei 2021 dalam hal Pelaksanaan Keuangan Negara dan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah (Kunker PANJA BUMN Energi: 1) Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur dalam rangka Peninjauan Proyek Pembangunan Jaringan Gas oleh PT Perusahaan Gas Negara, Tbk; dan 2) Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur dalam rangka Peninjauan Proyek Pengembangan Lapangan Unitisasi Gas Jambaran- Tiung Biru oleh PT Pertamina EP Cepu). 7. RDP dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM, RDP Senin, 31 Mei 2021 Pkl 13.00 s.d. selesai, dalam hal Pelaksanaan Keuangan Negara dan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah (Membahas Program Kerja Menteri Investasi/Kepala BKPM dan Membahas realisasi investasi sampai dengan bulan Mei 2021). C. FUNGSI ANGGARAN 1. Rapat Kerja dengan Kementerian BUMN, Kamis 3 Juni 2021 Pkl.10.00 WIB, dalam hal Pembahasan alokasi anggaran kementerian/lembaga dan Pembahasan rencana kerja dan anggaran (Pembahasan RKP dan RKA K/L Tahun 2022). 2. RDP dengan KPPU, BSN, BP BATAM, dan BPKS Sabang, Selasa 8 Juni 2021 Pkl.10.00-12.00 WIB Pembahasan alokasi anggaran kementerian/lembaga; 3. Pembahasan rencana kerja dan anggaran

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		4. Rapat Kerja dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM, Selasa, 8 Juni 2021 Pkl 14.00-16.00 WIB dalam hal Pembahasan alokasi anggaran kementerian/lembaga dan Pembahasan rencana kerja dan anggaran (Pembahasan RKP dan RKA K/L Tahun 2022). 5. Rapat Kerja, dengan Kementerian Perdagangan RI, Senin 31 Mei 2021 Pkl 16.00 WIB. 6. Rapat Kerja, dengan Kementerian Menteri Koperasi dan UKM, Rabu 2 Juni Pkl 10.00-12.00 WIB dalam hal Pembahasan alokasi anggaran kementerian/lembaga dan Pembahasan rencana kerja dan anggaran (Pembahasan RKP dan RKA K/L Tahun 2022). 7. Rapat Kerja, dengan Kementerian Perindustrian, Rabu 2 Juni Pkl 14.00 WIB - selesai, dalam hal Pembahasan alokasi anggaran kementerian/lembaga dan Pembahasan rencana kerja dan anggaran (Pembahasan RKP dan RKA K/L Tahun 2022).
7.	KOMISI VII	A. FUNGSI LEGISLASI - B. FUNGSI PENGAWASAN 1. RDP dengan Dirjen Migas Kementerian ESDM dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) membahas: 1) Laporan rencana dan progress LPG 3 kg untuk TA 2021 sebesar 7,5 juta metrik ton. 2) Evaluasi implementasi program Pertashop.

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		3) Perkembangan proyek GRR Tuban. 2. RDP dengan Kepala SKK Migas dengan menghadirkan 7 KKKS minyak dan gas terbesar membahas: a. Performa penerimaan negara sektor hulu Migas pada Tahun 2021 dan Target Tahun 2022. b. Progress <i>Lifting</i> Tahun 2021 dan target Lifting Migas Tahun 2022. c. Progress <i>Cost Recovery</i> Tahun 2021 dan target Tahun 2022. d. Proyeksi Indonesia <i>Crude Price</i> (ICP) Tahun 2022. e. Penjelasan mengenai semua peralihan blok-blok minyak dan gas yang telah selesai kontrak. 3. RDP dengan Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM dan Direktur Utama PT PLN (Persero) membahas: a. Penjelasan perkembangan pembahasan RUPTL Tahun 2021. b. Perkembangan Program Indonesia Terang. c. Penjelasan terkait Pembangkit Tenaga Listrik yang belum selesai (mangkrak). 4. Komisi VII mendapat penugasan dari Wakil Ketua Korkesra untuk membahas Calon Ketua dan Anggota Komite BPH Migas Masa Jabatan 2021-2025, dan kegiatan <i>Fit and Profer Test</i> dilaksanakan tanggal 21 - 23 Juni 2021. 5. Raker dengan Menteri ESDM membahas:

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		a. Pembahasan pengajuan Asumsi Dasar Makro sektor ESDM dalam RAPBN 2022 oleh Pemerintah, dan dilanjutkan penetapannya. b. Pengantar Pagu Indikatif RKA-K/L & RKP-K/L dalam RAPBN 2022. C. FUNGSI ANGGARAN 1. Tanggal 2-10 Juni 2021 akan melakukan pembahasan anggaran dengan mitra kerja Tahun Anggaran 2022. 2. RDP dengan Eselon I Kementerian ESDM (Sekjen, Irjen, Dirjen Migas, Dirjen Ketenagalistrikan, Dirjen EBTKE, BPMA) membahas: a. Progress pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2021. b. Pembahasan RKA-K/L & RKP K/L Tahun 2022. 3. RDP dengan Eselon I Kementerian ESDM (Dirjen Minerba, Kepala Badan Geologi, Kepala BPSDM, Kepala Balitbang ESDM, Sekjen DEN, Kepala BPH Migas) membahas: a. Progress pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2021. b. Pembahasan RKA-K/L & RKP K/L Tahun 2022. 4. RDP dengan Eselon I Kementerian ESDM (Sekjen, Irjen, Dirjen Migas, Dirjen Ketenagalistrikan, Dirjen EBTKE, BPMA) membahas Pendalaman RKAKL Tahun Anggaran 2022. 5. RDP dengan Kepala BRIN dan para Kepala LPNK membahas:

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		a. Penjelasan mengenai realisasi struktur organisasi dan fungsi BRIN sesuai Perpres No. 33 Tahun 2021. b. Progres pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2021. c. pembahasan RKA-K/L dan RKP-K/L Tahun Anggaran 2022. d. Penetapan RKA-K/L dan RKP-K/L Tahun Anggaran 2022. 6. Raker dengan Menteri Keuangan membahas Asumsi makro Sektor ESDM dalam Postur RAPBN Tahun Anggaran 2022. 7. RDP dengan Eselon I Kementerian ESDM membahas review RKA-K/L Tahun Anggaran 2022 berdasarkan prioritas program yang bermanfaat langsung bagi masyarakat. 8. Raker dengan Menteri ESDM membahas: a. Penetapan Asumsi Dasar Makro Sektor ESDM dalam RAPBN Tahun Anggaran 2022. b. Penetapan RKA K/L Tahun Anggaran 2022.
8.	KOMISI VIII	A. FUNGSI LEGISLASI - B. FUNGSI PENGAWASAN - C. FUNGSI ANGGARAN -

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
9.	KOMISI IX	A. FUNGSI LEGISLASI 1. Panja Pengawasan Tata Kelola Obat dan Panja Pengawasan Tata Kelola Alat Kesehatan telah melakukan kegiatan finalisasi laporan panja berdasarkan masukan dari rapat-rapat dan kunjungan kerja. B. FUNGSI PENGAWASAN 1. RDPU dengan Direktur Utama PT Bio Farma dan Komnas Kejadian Ikutan Pascaimunisasi (KIPI) tentang (1) keamanan dan efektivitas vaksin COVID-19 yang digunakan dalam program vaksinasi; dan (2) penanganan Kejadian Ikutan Pascaimunisasi (KIPI) dengan kesimpulan: (1) PT Bio Farma harus menjaga ketersediaan vaksin Covid-19 Bio Farma dengan memastikan produksi dan distribusi berjalan sesuai jadwal; (2) Komnas KIPI melakukan monitoring kepada masyarakat setelah vaksinasi Covid-19 serta melakukan Edukasi dan Sosialisasi terkait Kejadian Ikutan Pascaimunisasi (20 Mei 2021). 2. Rapat Kerja dan RDP dengan Kemenaker RI dan Kepala BP2MI tentang <i>progress</i> hasil pengkajian perlindungan jaminan sosial bagi Pekerja Migran Indonesia. Kesimpulan: Kementerian Ketenagakerjaan RI berkoordinasi dengan BP2MI dan BPJS Ketenagakerjaan menyusun regulasi perlindungan jaminan sosial bagi Pekerja Migran Indonesia (24 Mei 2021). 3. Tanggal 25 Mei 2021 RDP dengan: (1) Ketua DJSN; (2) Dewas BPJS Kesehatan; (3) Direksi BPJS Kesehatan; (4) Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI; (5) Kepala Pusat Pembiayaan

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		dan Jaminan Kesehatan (P2JK) Kemenkes RI tentang (1) keamanan data peserta BPJS Kesehatan; (2) persiapan implementasi Kebutuhan Dasar Kesehatan (KDK) dan kelas standar dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); (3) peningkatan pelayanan kesehatan dalam rangka pemerataan akses peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), termasuk pelaksanaan koordinasi antar Penyelenggara Jaminan (Coordination of Benefit) dengan kesimpulan: (1) Direksi BPJS Kesehatan bersama Dewan Pengawas BPJS Kesehatan segera melakukan forensik digital dan investigasi mendalam, baik secara internal maupun eksternal, serta membuat klarifikasi secara transparan kepada publik; (2) Kementerian Kesehatan RI dan DJSN segera mempersiapkan penerapan Kelas Rawat Inap (KRI) dan manfaat JKN berbasis Kebutuhan Dasar Kesehatan (KDK); (3) Kementerian Kesehatan segera mengeluarkan revisi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 76 Tahun 2016 tentang Pedoman Indonesia Case Base Groups (INA-CBGs) dalam pelaksanaan JKN yang memuat kriteria penjaminan klaim bayi baru lahir, sehingga BPJS Kesehatan memiliki payung hukum yang jelas untuk dapat segera membayarkan klaim bayi baru lahir periode sebelum 9 Juli 2020. 4. Raker, RDP, dan RDPU dengan Kementerian Kesehatan RI; Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19; PERSI; ARVI; ARSADA; ARSSI; RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet; PKFI; dan IDI tentang persiapan sistem kesehatan nasional sebagai antisipasi lonjakan kasus COVID-19 pascaliburan Idul Fitri 1442 H/2021 M dengan kesimpulan: (1) Perlunya langkah taktis dan strategi untuk mengendalikan penyebaran varian baru Covid-19, khususnya <i>Variant of</i>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<i>Concern</i> (VoC); (2) Kementerian Kesehatan RI dan Satgas Covid19 berkoordinasi dengan Komnas KIPi memperbaharui Standar Operasional Prosedur (SOP) Vaksinasi Covid19 (27 Mei 2021). 5. Kunjungan Kerja Spesifik ke (1) Bandara Internasional Kualanamu Medan, Provinsi Sumatera Utara untuk pengawasan alat <i>rapid antigen</i> bekas dengan kesimpulan praktik jasa daur ulang alat kesehatan <i>rapid test antigen</i> di Bandara Internasional Kualanamu berdampak serius terhadap masyarakat yaitu keselamatan dan keamanan konsumen (28 -30 Mei 2021). C. FUNGSI ANGGARAN 1. Rapat Kerja dan RDP dengan Kementerian Ketenagakerjaan RI dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) tentang Pembahasan RKA-K/L & RKP K/L Tahun 2022. Komisi IX DPR RI menerima penjelasan tentang Pagu Indikatif Kementerian Ketenagakerjaan RI dan BP2MI Badan Tahun Anggaran 2022 (2 Juni 2021). 2. RDP dengan Badan POM RI tentang Pembahasan RKA-K/L & RKP K/L Tahun 2022. Komisi IX DPR RI menerima penjelasan Badan POM RI Tahun Anggaran 2022 (14 Juni 2021).
10.	KOMISI X	A. FUNGSI LEGISLASI 1. Sudah selesai dilakukan penyusunan Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor ... Tahun ...Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		Keolahragaan Nasional dan telah diputuskan menjadi usul inisiatif DPR RI dalam sidang Paripurna. Saat ini menunggu terbitnya SurPres. 2. Pembahasan RUU Tentang Praktik Psikologi, telah melaksanakan Raker dengan Kementerian sesuai SurPres, dan Pemerintah sudah mengirimkan DIM. Saat ini sedang dilakukan pendalaman mengenai isu-isu krusial dalam RUU Praktik Psikologi. B. FUNGSI PENGAWASAN 1. Pertemuan dengan Kemendikbudristek RI membahas tentang: Panja PGTKH-ASN Komisi X DPR RI masih bekerja dan direncanakan akan diakhiri pada masa persidangan V TS 2020-2021. Pada tanggal 24 Mei 2021 Panja PGTKH-ASN telah melaksanakan RDP dengan LPTK, dengan beberapa poin yang disampaikan panja, yaitu: a. mendorong pemerintah untuk melakukan pembenahan LPTK diantaranya dengan perbaikan sarana prasarana dan perekrutan calon mahasiswa yang memiliki minat dalam mengajar, sehingga LPTK menjadi sumber perekrutan guru yang berkualitas. b. mendorong pemerintah memperhatikan kualitas guru secara proporsional dari aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif dalam melakukan seleksi 1.000.000 (satu juta) guru PPPK. c. mendesak pemerintah untuk membuat pemetaan kesiapan anggaran pemerintah daerah dalam melaksanakan program 1.000.000 (satu juta) guru PPPK.

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		d. mendorong pemerintah melakukan pengaturan afirmasi yang lebih proporsional dan terperinci (Guru 3T, SLB, PAUD) dalam seleksi 1.000.000 (satu juta) guru PPPK. e. mendesak pemerintah menuntaskan program 1.000.000 (satu juta) guru PPPK pada tahun 2021 agar permasalahan kekurangan dan pemerataan guru di setiap jenjang dapat terselesaikan. 2. Pada tanggal 31 Mei 2021 dilaksanakan Raker dengan Kemendikbudristek RI, antara lain membahas perubahan nomenklatur kemendikbud RI menjadi Kemenristekdikti RI, PTM Terbatas dan PPDB, dengan beberapa penekanan dari Komisi X DPR RI: a. mengapresiasi Pemerintah yang telah mengubah nomenklatur Kemendikbud RI menjadi Kemendikbudristek RI. Hal ini sesuai dengan semangat integrasi pendidikan dan penelitian yang disampaikan oleh pemangku kepentingan pendidikan, khususnya perguruan tinggi. b. mendorong Kemendikbudristek RI memastikan kedisiplinan dalam pelaksanaan protokol kesehatan dilaksanakan dengan benar di setiap satuan pendidikan yang melaksanakan PTM terbatas, termasuk jaminan setiap peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) mendapatkan <i>screening test</i>. c. Mendesak Kemendikbudristek RI untuk segera memastikan adanya prioritas dan kuota vaksin untuk PTK sebagai bagian dari pelaksanaan PTM terbatas. d. Kebijakan PPDB harus terus menerus dilakukan evaluasi dan monitoring.

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		C. FUNGSI ANGGARAN 1. Pertemuan dengan Kemendikbudristek RI pada Raker 3 Juni 2021 membahas tentang Pembicaraan Pendahuluan RKA K/L dan RKP Tahun 2022. Pagu Indikatif sebesar Rp73.082.867.097.000 2. Pertemuan dengan Kemenparekraf RI pada Raker 2 Juni 2021 membahas tentang Pembicaraan Pendahuluan RKA K/L dan RKP Tahun 2022. Pagu Indikatif sebesar Rp3.816.970.382.000 3. Pertemuan dengan Kemenpora RI pada Raker 3 Juni 2021 membahas tentang Pembicaraan Pendahuluan RKA K/L dan RKP Tahun 2022. Pagu Indikatif sebesar Rp1.948.783.392.000 4. Pertemuan dengan Perpustakaan RI pada RDP 2 Juni 2021 membahas tentang Pembicaraan Pendahuluan RKA K/L dan RKP Tahun 2022. Pagu Indikatif sebesar Rp667.521.289.000
11.	KOMISI XI	A. FUNGSI LEGISLASI - B. FUNGSI PENGAWASAN 1. Komisi XI telah melaksanakan Rapat kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan pada tanggal 24 Mei 2021, membahas mengenai sinergi fiskal Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dengan kesimpulan sebagai berikut:

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		1) Komisi XI DPR RI telah memperoleh penjelasan Menteri Keuangan atas sinergi fiskal pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan evaluasi terhadap kebijakan Kementerian Keuangan sebagai bahan pengawasan. 2) Menteri Keuangan agar mengantisipasi pengelolaan keuangan negara dalam APBN 2021 terhadap ketidakpastian situasi akibat pandemi COVID-19, perubahan kondisi perekonomian global, dan kebijakan ekonomi negara maju. 3) Menteri Keuangan dalam mengelola keuangan negara agar mengoptimalkan penerimaan perpajakan sejalan dengan situasi pemulihan ekonomi, mempertajam belanja pemerintah pusat yang lebih berkualitas, dan mengendalikan risiko pembiayaan dan utang APBN yang tetap menjaga kesinambungan fiskal ke depan. 4) Menteri Keuangan agar memformulasikan kebijakan Tranfer ke Daerah yang lebih mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah serta mendorong kinerja belanja pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. 2. Komisi XI melakukan kunjungan kerja spesifik pada tanggal 27-30 Mei 2021 terkait fungsi pengawasan terhadap: 1) Pelaksanaan stimulus bantuan sektor pariwisata ke Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Kabupaten Badung (Provinsi Bali). 2) UMKM Binaan Bank Indonesia ke Kantor perwakilan Bank Indonesia Kota Denpasar (Provinsi Bali) dan Kota Mataram (Provinsi Bali).

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		3. Komisi XI melakukan kunjungan kerja spesifik terkait fungsi pengawasan UMKM Binaan Bank Indonesia pada tanggal 4-6 Juni 2021, ke Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kota Bogor (Provinsi Jawa Barat), Kota Bandung (Provinsi Jawa Barat), dan Kota Serang (Provinsi Banten). 4. Komisi XI melakukan kunjungan kerja spesifik pada tanggal 11-13 Juni 2021 terkait fungsi pengawasan terhadap: 1) Progress dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Pertumbuhan Ekonomi ke Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau. 2) Dukungan ekspor kepada UMKM ke Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Kalimantan Timur. 3) Progress dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Pertumbuhan Ekonomi ke Kantor Gubernur Provinsi Kepulauan Riau dan Walikota Batam. C. FUNGSI ANGGARAN 1. Komisi XI telah melaksanakan Rapat kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan, Menteri PPN, Gubernur Bank Indonesia, Ketua DK OJK, dan Kepala BPS pada tanggal 2 dan 8 Juni 2021, membahas Asumsi Dasar dalam Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun 2022, dengan kesimpulan raker menyetujui bahwa pembahasan Asumsi Dasar dalam Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun 2022 dibentuk 2 (dua) Panja, yaitu Panja Penerimaan dan Panja Pertumbuhan dan Pembangunan Nasional. Rapat Panja dilaksanakan pada tanggal 2, 3, dan

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN																																								
		7 Juni 2021. Sehingga Pengambilan Keputusan terhadap Asumsi Dasar dalam Pembicaraan Pendahuluan Tahun 2022 dilaksanakan pada Rapat Kerja Komisi XI DPR RI tanggal 8 Juni 2021, dengan kesimpulan sebagai berikut: 1) Komisi XI DPR RI bersama Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Gubernur Bank Indonesia dan Wakil Ketua DK OJK, menyepakati: 2) Besaran Asumsi Dasar Ekonomi Makro dan Target Pembangunan dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2022 sebagai berikut: <table><tr><th>NO</th><th>INDIKATOR</th><th>BESARAN</th><th>KESEPAKATAN</th></tr><tr><td colspan="3">ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO</td><td></td></tr><tr><td>1.</td><td>Pertumbuhan Ekonomi (%, YoY)</td><td>5,2 - 5,8</td><td>5,2 - 5,8</td></tr><tr><td>2.</td><td>Inflasi (%, YoY)</td><td>2,0 - 4,0</td><td>2,0 - 4,0</td></tr><tr><td>3.</td><td>Nilai Tukar Rupiah (IDR/USD)</td><td>13.900 – 15.000</td><td>13.900 – 15.000</td></tr><tr><td>4.</td><td>Tingkat Suku Bunga SBN 10 Tahun (%)</td><td>6,32 - 7,27</td><td>6,32 - 7,27</td></tr><tr><td colspan="3">TARGET PEMBANGUNAN</td><td></td></tr><tr><td>1.</td><td>Tingkat Pengangguran Terbuka (%)</td><td>5,5 – 6,3</td><td>5,5 – 6,3</td></tr><tr><td>2.</td><td>Tingkat Kemiskinan (%)</td><td>8,5 – 9,0</td><td>8,5 – 9,0</td></tr><tr><td>3.</td><td>Gini Rasio (indeks)</td><td>0,376 – 0,378</td><td>0,376 – 0,378</td></tr></table>	NO	INDIKATOR	BESARAN	KESEPAKATAN	ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO				1.	Pertumbuhan Ekonomi (%, YoY)	5,2 - 5,8	5,2 - 5,8	2.	Inflasi (%, YoY)	2,0 - 4,0	2,0 - 4,0	3.	Nilai Tukar Rupiah (IDR/USD)	13.900 – 15.000	13.900 – 15.000	4.	Tingkat Suku Bunga SBN 10 Tahun (%)	6,32 - 7,27	6,32 - 7,27	TARGET PEMBANGUNAN				1.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,5 – 6,3	5,5 – 6,3	2.	Tingkat Kemiskinan (%)	8,5 – 9,0	8,5 – 9,0	3.	Gini Rasio (indeks)	0,376 – 0,378	0,376 – 0,378
NO	INDIKATOR	BESARAN	KESEPAKATAN																																							
ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO																																										
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%, YoY)	5,2 - 5,8	5,2 - 5,8																																							
2.	Inflasi (%, YoY)	2,0 - 4,0	2,0 - 4,0																																							
3.	Nilai Tukar Rupiah (IDR/USD)	13.900 – 15.000	13.900 – 15.000																																							
4.	Tingkat Suku Bunga SBN 10 Tahun (%)	6,32 - 7,27	6,32 - 7,27																																							
TARGET PEMBANGUNAN																																										
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,5 – 6,3	5,5 – 6,3																																							
2.	Tingkat Kemiskinan (%)	8,5 – 9,0	8,5 – 9,0																																							
3.	Gini Rasio (indeks)	0,376 – 0,378	0,376 – 0,378																																							

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN			
		4.	Indeks Pembangunan Manusia (indeks)	73,41 – 73,46	73,41 – 73,46
		INDIKATOR PEMBANGUNAN			
		1.	Nilai Tukar Petani (NTP)	102 – 104	103 - 105
		2.	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	102 - 105	104 – 106
		3) Laporan hasil Panja Pertumbuhan dan Pembangunan Nasional dan Panja Penerimaan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kesimpulan ini. 4) Nilai tukar rupiah, pada tahun 2022, diasumsikan pada kisaran Rp13.900 hingga Rp15.000 per USD. Pemerintah dan otoritas moneter agar dapat mengoptimalkan momentum saat ini, di mana terjadi penguatan nilai tukar, net inflow modal asing, dan cadangan devisa yang meningkat, untuk dapat menjaga stabilitas nilai rupiah yang berkelanjutan sesuai dengan nilai fundamentalnya. 5) Kebijakan Fiskal pada tahun 2022, juga perlu didukung dengan Kebijakan Pengendalian inflasi, agar dapat memenuhi target sasaran inflasi 2,0% s.d. 4,0%. Pencapaian target inflasi tersebut agar sejalan dengan pemulihan ekonomi nasional, stabilitas nilai tukar, terjaganya pasokan barang, serta penguatan sinergi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Bank Indonesia untuk pengendalian inflasi pada seluruh komponen inflasi (<i>inti, volatile food, dan administered price</i>).			

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN																					
		2. Komisi XI DPR RI telah melaksanakan Rapat Dengar Pendapat bersama dengan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada tanggal 7 Juni 2021, dengan menyepakati hal-hal sebagai berikut: 1) Komisi XI DPR RI menyetujui Pagu Indikatif Badan Pemeriksa Keuangan dalam Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2022 setelah penyesuaian sebesar Rp3.729.615.152.000,00 (Tiga Triliun Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Miliar Enam Ratus Lima Belas Juta Seratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah) dengan rincian per program adalah sebagai berikut: <table> <tr> <th>NO</th><th>PROGRAM</th><th>PAGU INDIKATIF 2022 (Rupiah)</th></tr> <tr> <td>1.</td><td>Pemeriksaan Keuangan Negara</td><td>3.101.399.031.000</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>Dukungan Manajemen</td><td>628.216.121.000</td></tr> <tr> <td></td><td>Jumlah</td><td>3.729.615.152.000</td></tr> </table> 2) Komisi XI DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran Pagu Indikatif Badan Pemeriksa Keuangan dalam Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp861.991.930.000,00 (Delapan Ratus Enam Puluh Satu Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut: <table> <tr> <th>NO</th><th>PROGRAM</th><th>PAGU INDIKATIF 2022 (Rupiah)</th></tr> <tr> <td>1.</td><td>Pemeriksaan Keuangan Negara</td><td>590.248.023.000</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>Dukungan Manajemen</td><td>271.743.907.000</td></tr> </table>	NO	PROGRAM	PAGU INDIKATIF 2022 (Rupiah)	1.	Pemeriksaan Keuangan Negara	3.101.399.031.000	2.	Dukungan Manajemen	628.216.121.000		Jumlah	3.729.615.152.000	NO	PROGRAM	PAGU INDIKATIF 2022 (Rupiah)	1.	Pemeriksaan Keuangan Negara	590.248.023.000	2.	Dukungan Manajemen	271.743.907.000
NO	PROGRAM	PAGU INDIKATIF 2022 (Rupiah)																					
1.	Pemeriksaan Keuangan Negara	3.101.399.031.000																					
2.	Dukungan Manajemen	628.216.121.000																					
	Jumlah	3.729.615.152.000																					
NO	PROGRAM	PAGU INDIKATIF 2022 (Rupiah)																					
1.	Pemeriksaan Keuangan Negara	590.248.023.000																					
2.	Dukungan Manajemen	271.743.907.000																					

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN			
			Jumlah	861.991.930.000	
		3) Komisi XI DPR RI menyetujui Pagu Indikatif Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2022 setelah penyesuaian sebesar Rp1.725.863.324.000,00 (Satu Triliun Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah) dengan rincian per program adalah sebagai berikut:			
		NO	PROGRAM	PAGU INDIKATIF 2022	
		1.	Pengawasan Pembangunan	431.680.487.000	
		2.	Dukungan Manajemen	1.294.182.837.000	
			Jumlah	1.725.863.324.000	
		4) Komisi XI DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran Pagu Indikatif Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2022 antara Bappenas, Kementerian Keuangan dan BPKP sebesar Rp226.203.108.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Enam Miliar Dua Ratus Tiga Juta Seratus Delapan Ribu Rupiah) melalui mekanisme APBN murni, bukan melalui Anggaran Belanja Tambahan (ABT).			
		5) Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berkomitmen untuk melakukan pengelolaan anggaran secara efektif dan efisien dalam menjalankan program-program kegiatan yang			

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN												
		sudah disusun secara terencana dan terarah sesuai masukan Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI. 3. Komisi XI DPR RI telah melaksanakan Rapat Dengar Pendapat bersama dengan Kepala BPS dan Kepala LKPP pada tanggal 8 Juni 2021, membahas Pagu Indikatif BPS dan LKPP dalam Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun 2022, dengan menyepakati hal-hal sebagai berikut: 1) Komisi XI DPR RI menyetujui Pagu Indikatif Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp4.691.816.660.000,00 (Empat Triliun Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Miliar Delapan Ratus Enam Belas Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian per program adalah sebagai berikut: <table> <tr> <th>NO</th><th>PROGRAM</th><th>PAGU INDIKATIF 2022 (Rupiah)</th></tr> <tr> <td>1.</td><td>Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik</td><td>1.631.934.730.000</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>Dukungan Manajemen</td><td>3.059.881.930.000</td></tr> <tr> <td></td><td>Jumlah</td><td>4.691.816.660.000</td></tr> </table> a. BPS agar menyediakan data statistik yang berkualitas dalam mendukung penguatan kebijakan Program Prioritas Nasional. b. BPS agar meningkatkan layanan informasi data statistik kepada stakeholder dan masyarakat.	NO	PROGRAM	PAGU INDIKATIF 2022 (Rupiah)	1.	Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	1.631.934.730.000	2.	Dukungan Manajemen	3.059.881.930.000		Jumlah	4.691.816.660.000
NO	PROGRAM	PAGU INDIKATIF 2022 (Rupiah)												
1.	Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	1.631.934.730.000												
2.	Dukungan Manajemen	3.059.881.930.000												
	Jumlah	4.691.816.660.000												

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN												
		2) Komisi XI DPR RI menyetujui Pagu Indikatif Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2022 setelah penyesuaian sebesar Rp181.457.903.000,00 (Seratus Delapan Puluh Satu Miliar Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Ribu Rupiah) dengan rincian per program adalah sebagai berikut: <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th><th>PROGRAM</th><th>PAGU INDIKATIF 2022</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td><td>Pengadaan Barang/Jasa Nasional</td><td>65.682.833.000</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>Dukungan Manajemen</td><td>115.775.070.000</td></tr> <tr> <td></td><td>Jumlah</td><td>181.457.903.000</td></tr> </tbody> </table> a. LKPP agar memperkuat pelaksanaan kebijakan pengadaan barang dan jasa Pemerintah untuk meningkatkan kontribusi UMK dan produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah. b. LKPP agar meningkatkan kemudahan akses informasi dan layanan dalam sistem pengadaan barang dan jasa elektronik LKPP. 3) Sejalan dengan arah kebijakan belanja Pemerintah Pusat, maka Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kepala Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) agar melakukan reformasi sumber daya manusia (SDM), reformasi birokrasi, penguatan <i>spending better</i> melalui belanja yang efisien dan produktif, yang ditunjukkan dengan penjelasan sebelum dan sesudah perbaikan/perubahan pada RKA K/L RAPBN Tahun Anggaran 2022.	NO	PROGRAM	PAGU INDIKATIF 2022	1.	Pengadaan Barang/Jasa Nasional	65.682.833.000	2.	Dukungan Manajemen	115.775.070.000		Jumlah	181.457.903.000
NO	PROGRAM	PAGU INDIKATIF 2022												
1.	Pengadaan Barang/Jasa Nasional	65.682.833.000												
2.	Dukungan Manajemen	115.775.070.000												
	Jumlah	181.457.903.000												

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN												
		4. Komisi XI DPR RI telah melaksanakan Rapat Dengar dengan Menteri PPN/Kepala BAPPENAS pada tanggal 9 Juni 2021, membahas Pagu Indikatif Kementerian PPN/BAPPENAS dalam Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun 2022, dengan menyepakati hal-hal sebagai berikut: 1) Komisi XI DPR RI menyetujui Pagu Indikatif Kementerian PPN/Bappenas dalam Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2022 setelah penyesuaian sebesar Rp1.375.895.201.000,00 (Satu Triliun Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Dua Ratus Satu Ribu Rupiah) dengan rincian per program adalah sebagai berikut: <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th><th>PROGRAM</th><th>PAGU INDIKATIF 2022</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td><td>Perencanaan Pembangunan Nasional</td><td>746.603.340.000</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>Dukungan Manajemen</td><td>629.291.861.000</td></tr> <tr> <td></td><td>Jumlah</td><td>1.375.895.201.000</td></tr> </tbody> </table> 2) Melalui fungsi Kementerian PPN/ Bappenas, Menteri PPN/ Bappenas agar memastikan arah kebijakan program pemerintah pusat di setiap K/L sejalan dengan reformasi struktral yaitu reformasi SDM, reformasi birokrasi, efisiensi, infrastruktur belanja dasar, subsidi tepat sasaran dalam pembangunan infrastruktur daerah, serta antisipasi atau mitigasi risiko termasuk bencana. 3) Melalui fungsi Kementerian PPN/ Bappenas, Menteri PPN/ Bappenas agar memastikan	NO	PROGRAM	PAGU INDIKATIF 2022	1.	Perencanaan Pembangunan Nasional	746.603.340.000	2.	Dukungan Manajemen	629.291.861.000		Jumlah	1.375.895.201.000
NO	PROGRAM	PAGU INDIKATIF 2022												
1.	Perencanaan Pembangunan Nasional	746.603.340.000												
2.	Dukungan Manajemen	629.291.861.000												
	Jumlah	1.375.895.201.000												

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		program Pemerintah Pusat di setiap K/L “<i>Spending Better</i>” yang ditandai dengan belanja yang efisien, produktif, menghasilkan <i>multiplier effect</i> terhadap perekonomian, dan efektif dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. 4) Kementerian PPN/Bappenas agar memastikan setiap K/L menyajikan data dan informasi reformasi struktural dan reformasi <i>spending better</i> yang akan dijalankan pada tahun 2022, pada RKA/KL RAPBN Tahun Anggaran 2022 dengan menunjukkan perbaikan dan perubahannya. 5) Kementerian PPN/Bappenas agar memperhatikan reformasi kesehatan, pembangunan ketahanan pangan, komoditas unggul didaerah, pembangunan berbasis pertumbuhan ekonomi wilayah untuk dapat menavigasi program pembangunan di APBN TA 2022 yang menjadi atensi pimpinan dan anggota komisi XI DPR RI. 5. Komisi XI DPR RI telah melaksanakan Rapat Dengar dengan Menteri Keuangan pada tanggal 10 Juni 2021, membahas Pagu Indikatif Kementerian Keuangan dalam Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun 2022, dengan menyepakati hal-hal sebagai berikut: 1) Komisi XI DPR RI menyetujui Pagu Indikatif Kementerian Keuangan dalam Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp43.197.827.984.000,00 (Empat Puluh Tiga Triliun Seratus Sembilan Puluh Tujuh Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah) dengan rincian per program adalah sebagai berikut:

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN																							
			<table><tr><th>NO</th><th>PROGRAM</th><th>PAGU INDIKATIF 2022 (Rupiah)</th></tr><tr><td>1.</td><td>Kebijakan Fiskal</td><td>27.416.392.000</td></tr><tr><td>2.</td><td>Pengelolaan Penerimaan Negara</td><td>3.209.540.842.000</td></tr><tr><td>3.</td><td>Pengelolaan Belanja Negara</td><td>18.385.752.000</td></tr><tr><td>4.</td><td>Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko</td><td>144.004.172.000</td></tr><tr><td>5.</td><td>Dukungan Manajemen</td><td>39.798.480.826.000</td></tr><tr><td></td><td>Jumlah</td><td>43.197.827.984.000</td></tr></table>	NO	PROGRAM	PAGU INDIKATIF 2022 (Rupiah)	1.	Kebijakan Fiskal	27.416.392.000	2.	Pengelolaan Penerimaan Negara	3.209.540.842.000	3.	Pengelolaan Belanja Negara	18.385.752.000	4.	Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	144.004.172.000	5.	Dukungan Manajemen	39.798.480.826.000		Jumlah	43.197.827.984.000	
		NO	PROGRAM	PAGU INDIKATIF 2022 (Rupiah)																					
		1.	Kebijakan Fiskal	27.416.392.000																					
		2.	Pengelolaan Penerimaan Negara	3.209.540.842.000																					
		3.	Pengelolaan Belanja Negara	18.385.752.000																					
		4.	Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	144.004.172.000																					
		5.	Dukungan Manajemen	39.798.480.826.000																					
			Jumlah	43.197.827.984.000																					
		Berdasarkan Sumber Dana, Pagu Indikatif Kementerian Keuangan Tahun 2022 terdiri dari :																							
		<table><tr><td>1.</td><td>Rupiah Murni</td><td>33.625.032.287.000</td></tr><tr><td>2.</td><td>PNBP</td><td>7.086.197.000</td></tr><tr><td>3.</td><td>BLU</td><td>9.565.709.500.000</td></tr></table>	1.	Rupiah Murni	33.625.032.287.000	2.	PNBP	7.086.197.000	3.	BLU	9.565.709.500.000														
		1.	Rupiah Murni	33.625.032.287.000																					
		2.	PNBP	7.086.197.000																					
		3.	BLU	9.565.709.500.000																					
Anggaran BLU akan dibahas lebih lanjut oleh Komisi XI DPR RI.																									
2) Melalui fungsi Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan agar memastikan belanja Pemerintah Pusat di setiap K/L memiliki kualitas “ <i>Spending Better</i> ” yang ditandai dengan belanja yang efisien, produktif, menghasilkan <i>multiplier effect</i> terhadap perekonomian, dan efektif dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.																									
3) Menteri Keuangan dalam menjalankan program-program strategis pada tahun 2022 agar melakukan upaya, kebijakan, dan program yang di arahkan pada: penerimaan perpajakan yang sejalan dengan pemulihan ekonomi nasional, pendalaman pasar keuangan, inovasi pembiayaan, implementasi penganggaran berbasis kinerja di setiap																									

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		K/L dan Pemerintah Daerah, serta mengoptimalkan manfaat dari Kekayaan Negara yang dipisahkan, serta pengelolaan keuangan negara yang terintegrasi dan terkonsolidasi.
12.	BADAN LEGISLASI (BALEG)	1. Rapat Panja Badan Legislasi DPR RI dalam rangka penyusunan RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara dan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, menyepakati: 1) Seluruh masukan/pandangan yang telah disampaikan oleh Anggota Badan Legislasi akan menjadi bahan masukan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat. 2) Pembahasan lebih mendalam penyusunan RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara dan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat akan dibahas dalam rapat panja selanjutnya 3) Untuk mendapatkan masukan dari stakeholders dan masyarakat atas RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara dan

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, Baleg melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Papua Barat, Provinsi Kalimantan Utara, dan Provinsi Bali 2. Rapat Panja Badan Legislasi DPR RI dalam rangka Penyusunan RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara dan Pengadilan Tinggi Papua Barat, menyepakati: 1) Seluruh masukan/pandangan yang telah disampaikan oleh Anggota Badan Legislasi akan menjadi bahan masukan dalam Penyusunan RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara dan Pengadilan Tinggi Papua Barat. 2) Pembahasan lebih mendalam Penyusunan RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara dan Pengadilan Tinggi Papua Barat, akan dibahas dalam rapat panja selanjutnya. 3) Untuk mendapatkan masukan dari daerah Panja RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara dan Pengadilan Tinggi Papua Barat akan melakukan Kunjungan Kerja. 3. Rapat Panja Badan Legisasi DPR RI dalam rangka Penyusunan RUU tentang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin dan Pengdilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, menyepakati: seluruh masukan/pandangan yang telah disampaikan oleh Anggota Badan

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		Legislasi akan menjadi bahan masukan dalam penyempurnaan Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram. 4. RDPU dengan PBNU, Muhammadiyah dan MUI terkait penyusunan RUU tentang Larangan Minuman Berakohol menyepakati seluruh masukan/pandangan yang telah disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia, PB Nahdlatul Ulama dan PP Muhammadiyah serta masukan dari Anggota Badan Legislasi akan menjadi bahan masukan dalam Penyusunan RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol. 5. Rapat Panja Gabungan dalam rangka penyusunan RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi, RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama, menyepakati: hasil penyusunan ketiga RUU untuk segera diputuskan dalam Rapat Pleno Baleg. 6. Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengambilan Keputusan atas penyusunan RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi, RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama, menyepakati: menerima hasil kerja Panja atas penyusunan RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi, RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan RUU tentang Pembentukan Pengadilan

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		Tinggi Agama untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku
13.	BADAN URUSAN RUMAH TANGGA (BURT)	-
14.	BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA (BAKN)	1. Penyerahan telaahan BAKN terkait LHP BPK atas kegiatan operasional PT Patra Jasa serta anak perusahaan dan instansi terkait lainnya kepada Wakil Ketua DPR RI/KOREKKU (20 Mei 2021) 2. Kunjungan kerja ke Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk memperoleh masukan atas penelaahan terkait pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus (DAK) (20-22 Mei 2021). 3. Kunjungan kerja ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk memperoleh masukan atas penelaahan terkait pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus (DAK) (24-26 Mei 2021). 4. Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), INDEF (<i>Institute for Development of Economics and Finance</i>), KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan), dan CORE (<i>Center of Reform on Economic</i>) dalam rangka mendapatkan masukan terkait Dana Alokasi Khusus (27 Mei 2021).

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		5. Rapat Dengar Pendapat Umum dengan pakar Dr. Rudi Rubiandini dalam rangka mendapatkan masukan terkait kebijakan Subsidi Energi (2 Juni 2021). 6. Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama PT.PLN (Persero) dalam rangka mendapatkan masukan terkait kebijakan Subsidi Energi (2 Juni 2021). 7. Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Jenderal Anggaran dan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI dalam rangka mendapatkan masukan terkait Dana Alokasi Khusus (3 Juni 2021). 8. Rapat Dengar Pendapat dengan Deputy Bidang Pengembangan Regional BAPPENAS RI dalam rangka mendapatkan masukan terkait Dana Alokasi Khusus (3 Juni 2021).
15.	BADAN ANGGARAN (BANGGAR)	1. Rapat Kerja Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2022, Kebijakan Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF), Badan Anggaran-Perwakilan Pemerintah (Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Gubernur BI pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021. 1) Pemerintah menyampaikan dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2022. Dokumen KEM-PPKF ini nantinya akan digunakan sebagai bahan Pembicaraan Pendahuluan dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2022. 2) Banggar DPR RI menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada Pemerintah yang telah menyampaikan dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2022. KEM-PPKF tahun 2022 disusun masih dalam kondisi

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		ketidakpastian yang tinggi, akibat penyebaran pandemi Covid-19 yang masih terus berlangsung. Kita harus mampu merancang kebijakan fiskal yang efektif, fleksibel dan responsif, namun tetap dalam kerangka prudent dan akuntabel. 3) Vaksinasi telah menjadi game changer bagi pemulihan ekonomi nasional. Keberhasilan vaksinasi bisa mempercepat pengendalian penyebaran Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional, tetapi sebaliknya kegagalan vaksinasi akan membuat Covid-19 semakin tidak terkendali. Banggar DPR RI akan terus mendukung segala upaya yang sedang dilakukan oleh Pemerintah untuk mensukseskan roadmap pelaksanaan vaksinasi yang ditarget selesai pada pertengahan tahun 2022. 4) Pemerintah perlu melanjutkan program perlindungan sosial untuk menjaga daya beli dan konsumsi masyarakat sehingga mampu memperkuat fondasi kesejahteraan sosial, mencegah kenaikan angka kemiskinan dan pengangguran serta kerentanan akibat Covid-19. Selain itu, keberlanjutan program untuk memperkuat daya ungkit UMKM dan dunia usaha terus dilakukan agar mampu bangkit lebih kuat dan berdaya tahan tinggi. 5) Kebijakan fiskal yang diangkat oleh Pemerintah pada tahun 2022 “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”, harus sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022, memiliki makna penting bagi perbaikan fundamental perekonomian dan reformasi struktural yang harus diatasi segera. Antara lain, kualitas sumber daya manusia yang masih rendah, infrastruktur yang belum memadai, kurangnya produktivitas dan daya

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		saing, serta birokrasi, institusi dan regulasi yang tidak efisien, rumit dan belum bebas dari praktek moral hazard. 6) Setiap target indikator ekonomi makro yang dihasilkan, harus bisa menjadi faktor pendorong untuk mampu menggerakkan seluruh sektor dalam mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Sehingga, nantinya terdapat korelasi yang kuat antara kualitas pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dengan target penurunan angka kemiskinan, pengangguran dan gini ratio serta pencapaian nilai tukar petani dan nelayan pada tahun 2022. 7) Pemerintah perlu segera menuntaskan kebijakan Reformasi Perpajakan, karena ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari program Reformasi Perpajakan yang telah diluncurkan pada tahun 2017, dengan fokus pada penyelarasan sistem perpajakan agar sesuai dengan best-practices dan mampu mengantisipasi dinamika perubahan, terutama pesatnya perkembangan transaksi digital dalam jangka waktu menengah dan Panjang. 8) kebijakan manajemen pengelolaan subsidi yang digunakan selama ini masih memiliki kelemahan yang mendasar, mulai dari validitas data, pengendalian harga hingga volume. Masih terdapat exclusion error dan inclusion error dalam realisasi pemberian subsidi, masih banyak ditemukan, pihak yang seharusnya berhak menerima subsidi, tetapi tidak menerima, sedangkan pihak yang seharusnya tidak berhak menerima, tetapi ikut menerima subsidi.

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		9) Menginginkan agar belanja Pemerintah pusat harus mampu mendorong secara efektif keberhasilan penanganan Covid-19 dan akselerasi pemulihan ekonomi nasional serta mempersempit ruang terjadinya kerawanan sosial. Beberapa prioritas belanja yang dilakukan Pemerintah harus mampu mencapai sasaran yang tepat, salah satunya adalah dengan memperkuat alokasi anggaran perlindungan sosial yang sesuai dengan kebutuhan pemulihan ekonomi nasional tahun 2022. 10) Selain itu, rencana Pemerintah untuk melakukan penguatan kualitas hubungan keuangan pusat dan daerah perlu dilakukan dengan hati-hati, jangan sampai menimbulkan permasalahan baru bagi daerah. Pemerintah pusat dan daerah harus sama-sama melakukan evaluasi terhadap kendala yang terjadi selama ini, baik ditingkat pusat maupun daerah 11) APBN tahun 2022 merupakan APBN transisi menuju pelaksanaan APBN yang normal pada tahun 2023, dimana defisit anggaran akan kembali berada dibawah 3 persen, sebagaimana diamanahkan oleh UU. No.2 Tahun 2020. Usulan Pemerintah untuk menetapkan defisit anggaran pada tahun 2022 harus sudah dipastikan sudah sesuai dengan kebutuhan pembiayaan APBN dan roadmap sebelum memasuki kondisi normal pada tahun 2023.

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
16.	BADAN KERJASAMA ANTAR PARLEMEN (BKSAP)	BKSAP - KSB -> 6 Mei 2021 <i>Courtesy Call</i> Ketua BKSAP dengan Duta Besar Afghanistan, H.E.Mr. Faizullah Zaki Ibrahim Ketua BKSAP DPR RI dan Ketua GKSB Afghanistan Dr. Ir. H. Sodik Mudjahid (F-PGerindra) Pertemuan ini membahas berbagai potensi kerja sama antar kedua negara, khususnya dalam rangka meningkatkan kerja sama antar parlemen. Dubes Afghanistan menyatakan pentingnya meningkatkan hubungan antar parlemen karena parlemen merupakan cerminan dari aspirasi masyarakat sehingga diharapkan dengan peningkatan hubungan tersebut, kedua belah pihak dapat menerima dan bertukar aspirasi dari satu sama lain. kelompok persahabatan Afghanistan dan Indonesia yang terdiri dari 26 anggota Wolesi Jirga (Parlemen) yang mayoritas perempuan, dan kelompok persahabatan Afghanistan - Indonesia yang beranggotakan 16 anggota senat. Dubes menyatakan antusiasme dan rasa hormat yang besar kepada hubungan bilateral dengan Indonesia. Dubes juga menyampaikan kondisi terkini terkait peace process yang sedang terjadi yaitu penarikan 2500 Tentara Amerika dari Afghanistan. BKSAP – KSI -> 7 Mei 2021 Pertemuan Asia Pacific Group (APG) secara virtual dalam rangkaian “The 142nd IPU Assembly”

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		Ketua BKSAP dan anggota BKSAP Puteri A. Komarudin (F-PG) menghadiri pertemuan APG yang merupakan salah satu geopolitical groups dalam organisasi IPU. Delegasi Indonesia Dr. Fadli Zon mendapat dukungan besar untuk mewakili Asia Pacific Group sebagai anggota dari <i>Standing Committee on Democracy and Human Rights</i>, dan Puteri A. Komarudin sebagai anggota untuk <i>Bureau of Women Parliamentarians</i>. Sebelumnya, terdapat 3 orang kandidat yang bertarung memperebutkan 2 posisi di <i>Standing Committee and Human Rights</i> yaitu anggota parlemen dari Maldives dan Australia. Namun kemudian kandidat dari Australia menyatakan mundur dari pencalonan dan menyatakan dukungannya kepada Dr. Fadli Zon. Kandidat Indonesia lainnya, Puteri A. Komarudin, juga mendapatkan dukungan penuh dari seluruh parlemen anggota APG untuk menjadi anggota <i>Bureau of Women Parliamentarians of the IPU</i>. BKSAP – KSR -> 11 Mei 2021 <i>Meeting Delegation for Relation with the Countries of Southeast Asia and the Association of Southeast Asian Nations (DASE) - European Parlemen (secara virtual)</i> Pimpinan BKSAP DPR RI Dr. Mardani Ali Sera, M.Eng (F-PKS), Dr. Achmad Hafisz Tohir (F-PAN) dan Dr. Sihar Sitorus (F-PDIP).

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		Pertemuan membahas kemitraan Parlemen Eropa dengan DPR RI dalam membangun kerjasama, dialog konstruktif dan berbagi “best practices” mengenai berbagai isu yang menyangkut kepentingan bersama serta isu kawasan yang berfokus pada situasi terkini di Myanmar dan telah disampaikan draft <i>Joint Press Statement</i> sebagai komitmen untuk menjaga dan memajukan hubungan bilateral antara Uni Eropa - Indonesia berdasarkan nilai-nilai persahabatan, kerjasama mutualisme dan rasa saling percaya dan menghargai. Terkait situasi di Myanmar, kedua pihak berbagi pandangan yang sama : 1) menghargai dan mendukung penuh kesepakatan yang dicapai oleh ASEAN dan tanpa menunda waktu lebih lama lagi, 2) mengutuk dan menyampaikan duka mendalam terhadap korban junta Myanmar dan mendesak untuk mengambil langkah yang cepat dalam melindungi masyarakat Myanmar dan merestorasi Demokrasi, 3) mendorong Dewan Keamanan PBB untuk mempertimbangkan semua kemungkinan dalam mengakhiri krisis di Myanmar, termasuk penjatuhan sanksi, embargo, larangan perjalanan dan tindakan hukum di <i>International Criminal Court</i>. BKSAP

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		12 Mei 2021 <i>Courtesy Call Ketua BKSAP DPR RI dengan Duta Besar Palestina, H.E. Dr. Zuhair Al Shun</i> Ketua BKSAP, Dr. Fadli Zon (F-PGerindra) menyampaikan dukungan secara langsung terkait situasi yang dihadapi Palestina saat ini. Ketua BKSAP menyampaikan kecaman dan mengutuk tindakan Israel yang menyerang warga sipil Palestina di bulan suci Ramadhan sehingga mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan juga akan terus menyuarakan dukungan terhadap Palestina, melalui berbagai forum internasional dimana DPR RI menjadi pimpinan atau Anggota Organisasi Parlemen Internasional. 16-22 Mei 2021 <i>Kunjungan Diplomasi BKSAP DPR RI ke Bosnia dan Herzegovina</i> Delegasi dipimpin oleh Ketua BKSAP dan diikuti 8 orang Anggota BKSAP. Delegasi melakukan pertemuan dengan : 1. Duta Besar RI untuk Bosnia dan Herzegovina, Drs. H. Roem Kono, M. Ipol 2. Pertemuan dengan Pimpinan Parlemen Bosnia dilanjutkan dengan konferensi pers di Gedung Parlemen Bosnia.

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		3. Pertemuan dengan Kementerian Luar Negeri Bosnia, diterima oleh Wakil Menteri untuk Hubungan Bilateral, Mr. Ahmet Halilovic. 4. Kunjungan ke Masjid Istiklal Sarajevo dan Pertemuan dengan Imam Besar Masjid Istiklal Sarajevo. Hasil Pertemuan : a. Dubes RI untuk Bosnia menyambut baik kedatangan delegasi BKSAP, dan diharapkan dapat meningkatkan hubungan bilateral kedua negara, terutama kebijakan bebas visa, sehingga dapat meningkatkan kunjungan masyarakat Indonesia ke Bosnia, dan kunjungan wisatawan kedua negara. b. Hambatan dalam hubungan perdagangan antara Bosnia dan Indonesia, menurut Dubes RI untuk Bosnia, diantaranya penerapan tarif, sehingga barang-barang Indonesia menjadi mahal di Bosnia, padahal potensi Bosnia sangat besar sebagai pintu masuk produk-produk Indonesia di negara-negara Balkan dan Eropa. c. Dalam Pertemuan dengan Kementerian Luar Negeri Bosnia, dibahas mengenai Hubungan Bilateral dalam bidang ekonomi, pariwisata, dan pendidikan juga perlu ditingkatkan sehingga dapat terjadi <i>transfer of knowledge</i> diantara kedua negara.

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		d. Dalam Pertemuan dengan Parlemen Bosnia, dibahas mengenai kerjasama bilateral antara kedua negara, selain itu kedua parlemen juga membahas mengenai penanggulangan pandemi Covid 19. e. Dalam Kunjungan ke Masjid Istiqlal, Wakil Ketua BKSAP, Mardani Ali Sera menyampaikan bahwa melalui masjid Istiqlal, dapat dilihat bahwa masyarakat Indonesia memberikan contoh bagaimana berkontribusi bagi dunia internasional, dengan membantu pendirian rumah ibadah (Masjid Istiqlal, yang dibangun pada Tahun 1995-2001). f. Bahwa hubungan persaudaraan antara Indonesia dan Bosnia kedepannya harus diperkuat karena kedua negara telah berhubungan baik sejak zaman Presiden Soekarno dan Jend. Josep Broz Tito. Dan momentum kunjungan dapat digunakan untuk menyegarkan kerjasama yang menguntungkan antara kedua negara dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kedua negara. 19 Mei 2021 <i>Konferensi pers BKSAP DPR RI terkait serangan Israel terhadap Palestina</i> BKSAP DPR RI menyikapi eskalasi kekerasan Israel terhadap Palestina yang semakin mencemaskan, dengan mengambil langkah lanjutan dengan menginisiasi peluncuran sebuah pernyataan bersama (<i>Joint Statement</i>) yang mengajak anggota parlemen dari seluruh dunia mengutuk kebrutalan Israel.

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<i>Joint statement</i> disampaikan oleh Pimpinan BKSAP DPR dalam konferensi pers virtual yaitu: 1) kembali dan akan terus sangat mengutuk tindakan barbar Israel. 2) kami akan terus bergerak dengan aksi nyata sesuai kapasitas dan otoritas kami untuk menghentikan kekerasan tak berprikemanusiaan Israel. BKSAP – KSR -> 20 Mei 2021 <i>Sidang Virtual Asian Parliamentary Assembly (APA) Standing Committee on Economic and Sustainable Development</i> Delegasi BKSAP Adrian Jopie Paruntu (FPG) menghadiri Sidang <i>Asian Parliamentary Assembly (APA) Standing Committee on Economic and Sustainable Development</i> yang diselenggarakan secara daring/virtual dari Manama – Bahrain. Sidang APA ini membahas delapan (8) Draft Resolusi yaitu <i>Draft Resolution on the Establishment of an Asian Energy Market</i>, <i>Draft Resolution on Environmental Issues</i>, <i>Draft Resolution on Financial Affairs: Ensuring Efforts for Economic Growth</i>, <i>Draft Resolution on Poverty Eradication</i>, <i>Draft Resolution on the Role of APA Parliaments in Supporting the Implementation of the Sustainable Development Goals</i>, <i>Draft Resolution on Water and Sanitation in Asia for All</i>, <i>Draft Resolution on</i>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<i>Adopting a Road Map Providing for Measures to Stimulate Green Finance</i>, dan <i>Draft Resolution on Asian Climate Financial Initiative</i>. Hasil Sidang APA <i>Standing Committee</i> ini kemudian akan dilaporkan dalam Sidang Pleno APA guna mendapatkan persetujuan seluruh negara Anggota APA dan diadopsi menjadi Resolusi APA untuk diimplemetasikan. <i>Asian Parliamentary Assembly</i> (APA) adalah organisasi yang menghimpun parlemen negara-negara di kawasan Asia untuk tujuan perdamaian dan didirikan di Teheran – Iran pada tahun 2007 sebagai hasil trasformasi dari Sidang <i>Association of Asian Parliamentarians for Peace</i> (AAPP) hasil inisiasi Bangladesh pada tahun 1999. Saat ini APA beranggotakan Parlemen dari 42 negara dan Observer (6 Negara dan 9 Organisasi Internasional). Indonesia merupakan salah satu pendiri (<i>founding members</i>) dari AAPP dan APA, dan selalu aktif berpartisipasi dalam sidang-sidangnya. 24 Mei 2021 <i>Sidang Virtual The 4th AIPA Advisory Council on Dangerous Drugs (AIPACODD)</i> Johan Budi Sapto Pribowo (FPDIP), Anggota BKSAP menghadiri Sidang <i>The 4th AIPA Advisory Council on Dangerous Drugs</i> (AIPACODD) dengan tema “<i>Prevailing the Contemporary and</i>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<i>Responsive Challenges Towards Drug Free ASEAN</i>” secara virtual dari Bandar Seri Begawan - Brunei Darussalam. <i>Indonesia’s Country Report</i> yang memuat peran Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kepolisian Nasional dalam memberantas narkoba dan peran DPR RI untuk mendorong langkah-langkah yang lebih tegas dan tindakan keamanan yang lebih ketat, khususnya langkah-langkah preventif, serta mendesak Pemerintah agar segera membahas RUU Perubahan UU No.35 Tahun 2009 tentang narkoba. Politisi PDIP ini juga memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia dalam pembahasan resolusi untuk memasukkan klausul tentang cannabis dan perlunya kampanye kesadaran publik untuk mencegah pemahaman yang keliru terkait penghapusan cannabis dari <i>Schedule IV Single Convention on Narcotics and Drugs</i> 1961 dan penyalahgunaannya. Sidang AIPCODD merupakan sidang tahunan dan dihadiri oleh sepuluh negara Anggota AIPA, kecuali tahun ini, Myanmar tidak hadir. Sidang ini menghasilkan <i>Report of the 4th Meeting of AIPACODD</i> dan <i>Resolution on Prevailing the Contemporary and Responsive Challenges Towards Drug Free ASEAN</i>” untuk diadopsi dalam Sidang Umum ke-42 AIPA bulan Agustus mendatang.

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		BKSAP – KSB -> 24 Mei 2021 <i>Courtesy Call Ketua GKSB DPR-Parlemen Kolombia dengan Duta Besar Kolombia, H.E. Mr. Juan Camillo Valencia Gonzalez</i> Pertemuan tersebut membahas upaya peningkatan kerjasama di berbagai bidang. Indonesia memandang Kolombia sebagai partner yang tepat dalam peningkatan hubungan perdagangan karena komoditi perdagangan yang serupa namun dapat saling melengkapi. Dubes menyampaikan Indonesia dan Kolombia dapat saling berbagi mengenai metode, strategi dan praktis terbaik untuk peningkatan perdagangan serta produksi pertanian, peternakan, dan perikanan. Selain itu, sebanyak 10 MoU dalam berbagai bidang telah diproses dan ditandatangani, dimana hal tersebut turut memperkuat hubungan antara Indonesia dan Kolombia yang telah terjalin selama 40 tahun. Ketua GKSB DPR-Parlemen Kolombia, Yan Permenas Mandenas (F-PGerindra) mengapresiasi pembebasan wajib visa terhadap WNI oleh Pemerintah Kolombia. Dalam kesempatan ini Ketua GKSB dan Dubes juga membahas rencana kegiatan antara kedua negara yang akan diadakan dalam waktu dekat. 25 Mei 2021 <i>Rapat Internal GKSB DPR RI-Parlemen Arab Saudi</i>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		Rapat tersebut dihadiri secara fisik oleh Ketua GKSB DPR -Parlemen Arab Saudi, Idris Laena (F-PG), dan Anggota Dr. Jefry Romdonny (F-PGerindra), Johan Rosihan (F-PKS) dan Debby Kurniawan (F-PD) secara virtual. Ketua GKSB memberi usulan agar GKSB DPR RI - Parlemen Arab Saudi untuk fokus pada isu TKI dan Kuota Haji. Ketua GKSB mengarahkan agar GKSB DPR RI - Parlemen Arab Saudi dapat memulai komunikasi dan koordinasi dengan Kemlu dan Dubes Arab Saudi untuk Indonesia terkait pending matters dan guna mendapatkan masukan yang lebih detail terkait perkembangan hubungan bilateral kedua negara. Dalam waktu dekat, akan diagendakan Rapat Konsultasi dengan Kemlu dan Courtesy Call dengan Dubes Arab Saudi untuk Indonesia. Apabila telah memungkinkan, GKSB juga akan mengagendakan kunjungan kerja untuk mengadakan pertemuan dengan Majelis Syura' Arab Saudi. BKSAP – KSI -> 25 Mei 2021 <i>Sidang virtual Governing Council dalam rangkaian acara sidang 142nd Inter-Parliamentary Union (IPU)</i>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		Anggota BKSAP DPR RI, Puteri Annetta Komarudin, menghadiri sidang virtual <i>Governing Council</i> dalam rangkaian acara sidang <i>142nd Inter-Parliamentary Union (IPU)</i> pada Selasa, 25 Mei 2021 pukul 19.00 WIB. Intervensi yang disampaikan dalam sidang ini adalah terkait pandangan Indonesia terhadap Pertemuan-pertemuan IPU kedepan, dimana pertemuan dengan model hybrid (offline dan online) masih menjadi alternatif terbaik untuk sidang-sidang mendatang. <i>“Even though we can still discuss through such online platform like what we are doing today, it would be more effective if there is an interactive discussion in where parliamentarians can meet in person. In the latter scenario, we surely have to consider the COVID-19 situations, and see if this option were feasible.”</i> 26 Mei 2021 <i>Pertemuan BKSAP DPR RI dengan Kementerian Luar Negeri RI sebagai rangkaian Inter-Parliamentary Union (IPU) Assembly ke-142</i> BKSAP DPR RI diwakili oleh Dr. Fadli Zon, Ketua BKSAP (F-Gerindra), Dr. Sihar Sitorus, Wakil Ketua BKSAP (F-PDIP), dan Puteri Komaruddin, Anggota BKSAP (F-Golkar) mewakili DPR RI sebagai anggota <i>Governing Council</i> di sidang IPU kali ini.

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		Turut hadir anggota BKSAP yaitu Gilang Dhiela Fararez (F-PDIP), Arkanata Akram (F-Nasdem), Arzeti Bilbina (F-PKB), dan Didi Irawadi Syamsuddin (F-Demokrat). Kementerian Luar Negeri RI yang diwakili oleh Penny Dewi Herasati, Direktorat Sosial Budaya dan Organisasi Internasional (OINB) juga memberikan pemaparan terkait update fokus kebijakan Luar Negeri Indonesia, yaitu Konflik Israel Palestina, Situasi dan kondisi di Myanmar, dan Pengadaan Vaksin Covid-19. 26 Mei 2021 <i>Intervensi Wakil Ketua BKSAP DPR dalam sidang General Assembly IPU 142</i> Dr. Sihar Sitorus, anggota <i>Governing Council</i> di IPU Assembly ke-142 menghadiri sesi assembly yang diselenggarakan. Wakil Ketua BKSAP DPR menyampaikan intervensinya dengan menekankan bahwa Pandemi Covid-19 merupakan babak baru yang merubah banyak hal dalam kehidupan kita termasuk memberikan pandangan baru bahwa sistem kesehatan dan ekonomi global dapat dibuat menjadi lebih sustainable. Sebagai bentuk nyata dari percepatan pemulihan global, kita perlu memperkuat kerja sama dan solidaritas global. Parlemen harus menjadi kekuatan penting dalam mendorong upaya nasional penanggulangan Covid-19 melalui fungsi-fungsi yang dimilikinya. Parlemen juga harus memastikan prinsip-prinsip

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		demokrasi dan kebebasan masyarakat dapat terus terjaga, walaupun di tengah kedaruratan seperti saat ini. Masalah Palestina juga diangkat pada persidangan IPU kali ini. DPR RI meminta IPU dan berbagai organisasi parlemen dunia lainnya untuk mengambil tindakan nyata terkait tindakan Israel yang melanggar hak-hak dasar bangsa Palestina. BKSAP – KSB -> 2 Juni 2021 <i>Pertemuan Bilateral dengan Perwakilan Tinggi Uni Eropa/Wakil Presiden Komisi Eropa Yang Mulia Josep Borell Fonteles</i> Pertemuan tersebut dihadiri oleh Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid (F-PG) dan anggota Komisi I Dave A. Fikarno (F-PG), Nurul Arifin (F-PG) serta Rizki A. Natakusumah (F-PD) serta Anggota BKSAP DPR RI dari Komisi VII Dyah Roro Esti (F-PG). Dalam kesempatan tersebut, Dyah Roro menjelaskan mengenai Dilema yang dihadapi oleh negara berkembang seperti Indonesia dalam pengembangan energi baru dan terbarukan. Terutama ketika negara berkembang tersebut memiliki kekayaan sumber daya mineral cukup tinggi, yang selama ini dimanfaatkan sebagai sumber energi utama. Dilema tersebut timbul ketika negara harus melakukan penyesuaian dan penyeimbangan antara pemanfaatan sumber energi mineral dengan

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		energi baru dan terbarukan dalam rangka memenuhi Agenda Pembangunan Berkelanjutan dan Perjanjian Paris mengenai lingkungan hidup. Politisi muda dari Fraksi Partai Golkar ini juga menjelaskan mengenai RUU Energi Baru dan Terbarukan yang saat ini tengah di susun oleh Komisi VII DPR RI serta peluang kerja sama dalam pengembangan teknologi pemanfaatan sumber energi alternatif yang telah lebih dulu berjalan di Eropa. 7 Juni 2021 <i>Friendly Talk Ketua GKSB DPR-Parlemen Romania, Nurul Arifin (FPG) dengan Ketua Kelompok Persahabatan Parlemen Romania-Indonesia, Mr. Stefan Musoiu</i> Hadir pula dalam pertemuan tersebut Nevi Zuairina (F-PKS) Anggota GKSB dan Dubes Romania utk Indonesia, Y.M. Dan Adrian Balanescu. Dalam pertemuan virtual tersebut dibahas upaya peningkatan hubungan antar parlemen kedua, baik secara bilateral maupun secara multilateral dalam berbagai organisasi parlemen yang diikuti kedua negara, termasuk rencana saling kunjungan diantara kedua parlemen.

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		Hubungan baik antara Romania dan Indonesia yg telah terjalin dengan baik, dapat terus ditingkatkan, baik dari sisi peningkatan kerjasama di bidang ekonomi & perdagangan, kerjasama budaya, pendidikan maupun kerjasama dalam bidang keamanan siber. Dalam penanganan Covid-19, Romania sudah termasuk dalam zona hijau dimana pasien yang terjangkit Covid-19 disana kurang dari 1% populasi. Kunjungan Parlemen Romania ke Indonesia beberapa waktu yang lalu juga menunjukkan kepercayaan masyarakat dunia dan memandang keberhasilan Pemerintah dalam menekan laju pertumbuhan kasus Covid-19.
17.	MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN (MKD)	1. Mahkamah Kehormatan Dewan mengadakan Rapat Pimpinan membahas program kerja Mahkamah Kehormatan Dewan untuk Masa Sidang V Tahun Anggaran 2020-2021. 2. Mahkamah Kehormatan Dewan mengadakan Rapat Intern untuk mengesahkan program kerja Mahkamah Kehormatan Dewan Masa Sidang V Tahun Anggaran 2020-2021. 3. Mahkamah Kehormatan Dewan akan melaksanakan Kunjungan Kerja ke beberapa daerah dalam rangka Sosialisasi tentang Tugas, Fungsi dan Wewenang Mahkamah Kehormatan Dewan dan Sosialisasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) khusus untuk kendaraan Dinas Anggota DPR RI.